

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
BUKIT SEBURI II KECAMATAN ADONARA BARAT
KABUPATEN LORES TIMUR**

Skripsi

Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu
Administasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Bosowa

**OLEH
AGUSTINUS G LEIN
45 10 021 041**



**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Agustinus G Lein

Nomor stambuk : 4510021041

Jurusan : Administrasi Negara

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Di Desa Bukit
Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten
Flores Timur.

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar

Makassar , 19 Desember 2016

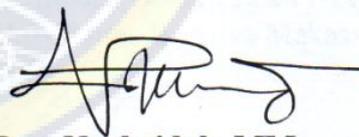
Menyetujui ;

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd

PEMBIMBING II



Dra. Nurkaidah, MM

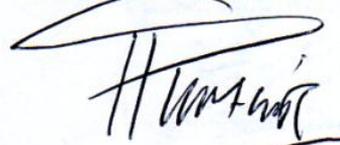
Mengetahui ;

DEKAN FAK. ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK



Arief Wicaksono, S.ip, MA

KETUA JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Drs. Natsir Tompo, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepulu bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas skripsi dengan judul “Pamanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”

Nama : AGUSTINUS GEBEN LEIN
Nomor Pokok : 45 10 021 041
Jurusan : Administrasi Negara
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosil dan Ilmu Politik

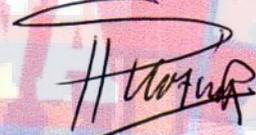
Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana strata satu (S1) dalam jurusan Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

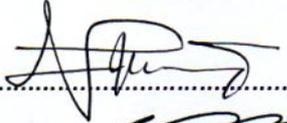
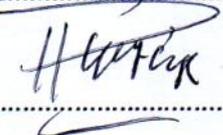
Ketua

Sekretaris


Arief Wicaksono S. Ip. MA
Dekan Fisipol
Universitas Bosowa Makassar


Drs. Natsir Tompo M.Si
Ketua Jurusan Administrasi Negara
Universitas Bosowa Makassar

TIM PENGUJI

1. Dr.Syamsuddin Maldun, M.Pd (**Ketua**)  (.....)
2. Dra, Nurkaidah, MM (**Sekretaris**)  (.....)
3. Arief Wicaksono S. Ip. MA  (.....)
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si  (.....)

motto

*Tidak ada kekayaan yang melebihi akal dan
tidak ada kemelaratan yang melebihi
kebodohan*



by : Gusti Fein

KATA PENGANTAR

Dengan penuh sukacita, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setianya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan, bahkan sering terjadi pengorbanan dalam berbagai hal. Namun, penulis menyadari bahwa semua itu merupakan romantika dalam mengarungi dunia kampus yang serba kompleks.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr H.M. Salle Pallu. M.eng, selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Arief Wicaksono,S.Ip,M.A Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Drs. M. Natsir Tompo, M.Si, selaku ketua jurusan ilmu Administrasi Negara
4. Bapak Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd, selaku pembimbing I dan

Ibu Dra. Nurkaidah, MM, selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu serta memberikan dorongan selama waktu penulisan.

5. Segenap Dosen pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun Staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Bapak Dominikus Sanga Nuba selaku kepala Desa Bukit Seburi II, yang telah memberikan Ijin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
7. Ayahanda Bernadus Bayo (Alm) dan Ibunda tercinta Yuliana Bulu yang dengan kasih sayang mereka berdua telah mendidik peneliti sampai sekarang. Dan dengan dukungan materiil, moril, dan motivasi serta doa-doa yang selalu terpanjatkan di setiap malam, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini. *Inilah salah satu wujud baktiku..*
8. Kakak Ignas Lein, Fan Lein, Marlen Lein Yanti Lein terima kasih banyak karena selalu memberi support dalam kondisi apapun selama penulisan skripsi ini dan selalu mendambakan keberhasilan peneliti.
9. Semua pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat namun tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu, peneliliti hanya bisa menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan dari saudara-saudari semua

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ku angkatan 2010: Arri, Maya, Sajida, Dan semua teman-teman saya SOMASI 2010. Terimah kasih banyak telah memberikan dukungan moriil kepada saya.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat imbalan yang berlipat ganda dari yang Maha Kuasa. Penulis mengharapkan semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya dibidang Administrasi Negara.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti membuka diri untuk menerima kritikan koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Makassar, 19 Desember 2016

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kebijakan Publik	10
B. Pemberdayaan Masyarakat	11
C. Otonomi Desa.....	15
D. Alokasi Dana Desa.....	19
E. Kerangka Konsep.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data.....	37

D. Informan Penelitian.....	37
E. Deskripsi Fokus dan Indikator Penelitian.....	39
F. Instrumen Penelitian.....	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data.....	42

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Seburi II.....	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Keadaan Demografis.....	46
3. Keadaan Ekonomi dan Budaya.....	52

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian	
1. Deskripsi Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.....	54
a. Tahap perencanaan.....	55
b. Tahap Pelaksanaan.....	62
c. Tahap Pengawasan.....	66
d. Tahap Pemanfaatan	68
e. Tahap Evaluasi.....	71
2. Deskripsi Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.....	74
a. Hambatan Sosial Budaya.....	75

b. Hambatan Sosial Ekonomi.....	76
B. Pembahasan Hasil penelitian	
1. Tahap perencanaan.....	76
2. Tahap Pelaksanaan.....	79
3. Tahap Pengawasan.....	81
4. Tahap Pemanfaatan	82
5. Tahap Evaluasi.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Jumlah Aparat Desa Dan Anggota Bpd Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.....	5
Tabel 2. Penggunaan Dana Program ADD.....	6
Tabel 3. Lokasi Pembangunan Talud pengaman banjir di Desa Bukit Seburi II.....	7
Tabel 4. Sebaran penduduk Desa Bukit Seburi II Berdasarkan Jenis kelamin dan KK Tahun 2016.....	46
Tabel 5. Keadaan Penduduk Desa Bukit Seburi II Menurut Umur Tahun 2016.....	48
Tabel 6. Golongan Penduduk Desa Bukit Seburi II Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016.....	50
Tabel 7. Golongan Penduduk Desa Bukit Seburi II Menurut Jenis Pekerjaan tahun 2016.....	51

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.	Kerangka Konsep.....	35
-----------	----------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara
- Lampiran 2. Riwayat Hidup
- Lampiran 3. Surat Ijin Penelitian Dari fakultas Ilmu Sosial Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Bosowa makassar
- Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian Dari Badan kesatuan bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur
- Lampiran 5. Surat Ijin Penelitian dari camat Adonara Barat
- Lampiran 6. Surat Ijin Penelitian dari Kepala Desa Bukit Seburi II
- Lampiran 7. Surat Selesai Penelitian dari Kepala Desa Bukit Seburi II
- Lampiran 8. Surat Selesai Penelitian dari camat Adonara Barat
- Lampiran 9. Surat Selesai Penelitian Dari Badan kesatuan bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Flores Timur

ABSTRAK

Agustinus G Lein. NIM 4510021041, Jurusan Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Bosowa Makassar, dengan judul Sikripsi “Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur”. Dibimbing oleh Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd selaku pembimbing I dan Dra. Nurkaidah, MM selaku pembimbing II.

Pendekatan partisipatif sangat mendukung tingkat keberhasilan pembangunan. Demikian juga dalam program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Seburi II. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menganalisa setiap gejala atau fenomena yang menghambat kegiatan pembangunan serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini.

Aspek- aspek dalam penelitian yang menjadi acuan adalah Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap pemanfaatan dan pada tahap evaluasi. Dengan metode deskriptif kualitatif, aspek tersebut ditelaah, penelaan ini menggunakan informen kunci dan informen pendukung sebagai pembanding. Dengan teknik wawancara peneliti mengumpulkan data dan menganalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berupa ide dan gagasan. Dalam hal ini, masyarakat menyepakati bidang pengembangan infrastruktur sebagai prioritas karena masyarakat membutuhkan infrastruktur dengan bidang kerja adalah pembangunan talud pengaman banjir. Pada tahap pelaksanaan berupa tenaga, waktu dan materi. Masyarakat juga melaksanakan fungsi pengawasan hingga pada saat terbentuknya tim pengawas dari kalangan masyarakat itu sendiri sampai pemanfaatan hasil program. Pada tahap evaluasi dilaksanakan evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses dilaksanakan secara baik namun pada evaluasi akhir masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh dengan alasan waktu terdesak oleh kegiatan desa yang lain.

Kata Kunci : partisipasi sangat menunjang keberhasilan pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan dan persaingan di pandang perlu pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada propinsi, /kota, khususnya pemerintah desa untuk menyelenggarakan daerah otonom. Tujuan penyerahan urusan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai aspek agar bisa bersaing dengan tuntutan perkembangan saman.

Bentuk dari kebijakan desentralisasi adalah membebaskan pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggungjawab untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan desentralisasi dalam UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang- undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945, peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pemantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melaluai merupakan suatu wahana yang membuka peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis dimana adanya pendekatan antara pemerintah dan masyarakat melalui pemilihan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tujuan dari desentralisasi tersebut adalah pemisahan tugas dan tanggung

jawab antarapemerintah pusat dan daerah, disamping itu otonomi daerah juga berarti memberikan kesempatan untuk membangun struktur pemerintahan sesuai dengan kebutuhan, membangun sistem dan pola karir dan administrasi serta mengembangkan system manajemen pemerintah yang efektif.

Menurut Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan UU No 12 tahun 2008 tersebut khususnya ditingkat Desa maka dibentuk aparatur Desa yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk mengurus dan melaksanakan pembangunan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, pemerintahan desa mesti siap melaksanakan pembangunan didesanya, sebagaimana pada sistem pemerintahan di provinsi kabupaten/kota. Kebijakan pembangunan pada pemerintahan desa dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau disebut (APBDesa).

Berkaitan dengan APBDesa tentulah berhubung dengan istilah keuangan desa, anggaran pendapatan desa, sehingga desa hendak dikelola secara efektif dan efisien agar keuangan tidak mengalami kendala . Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung desa pelaksanaan dan

keajiban, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Dalam bentuk otonomi pelaksana pembangunan nasional ditujukan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada dipedesaan, maka bagi kelangsungan kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada pedesaan, sehingga pembangunan nasional dikatakan berhasil apabila pembangunan dipedesaan baik dan meningkat.

Dengan disahkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Dari sisi regulasi, desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri) tidak lagi menjadi bagian dari UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa-desa di Indonesia akan mengalami reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang kuat terkait kebijakan ini, yang dibuktikan dengan telah disetujuinya anggaran dana desa sejumlah Rp20,7 triliun dalam Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa (Permendagri No. 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan) di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan agar anggaran tersebut dapat segera tersalurkan ke seluruh desa. Selain menerima dana langsung dari Pusat, sumber pembiayaan keuangan desa yang besar juga berasal dari transfer dana pusat melalui APBD yang dikenal ADD.

Sementara itu masih banyak peraturan menteri hingga akhir Desember 2014 yang belum diterbitkan. Mengingat masih maraknya korupsi di daerah, dengan variatifnya karakteristik desa, kompetensi aparat dan regulasi yang relatif baru diduga terdapat cukup banyak potensi korupsi dalam tiap tahapan penyaluran dana desa.

Desa Bukit Seburi II merupakan salah satu desa yang ada dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur dimana didalam menjalankan pemerintahan desa memiliki struktur organisasi yang mempunyai peran penting dalam desa. Dalam penyusunannya, Badan permusyawaratan desa (BPD) dan kepala desa merupakan rekan kerja dimana BPD bertugas untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan desa sedangkan kepala desa sebagai orang penggerak utama dalam desa tersebut. untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 1.1 yang terdapat pada halaman 5.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Aparat Desa Dan Anggota BPD Desa Bukit Seburii II
Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua BPD	1	
2	Wakil BPD	1	
3	Sekretaris BPD	1	
4	Anggota BPD	2	
5	Kepala Desa	1	
6	Sekretaris Desa	1	
7	Kepala Urusan	3	3 Bidang
8	Kepala Dusun	4	
Jumlah		14	

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Seburii II, 2016

Sebagai mana proses dari Otonomi, Desa Bukit seburii II berupaya agar masyarakat mengalami peningkatan pembangunan, baik dari segi materil ataupun dari segi pembangunan Desanya. Sebagai wujud dari Otonomi Desa, melalui kerjasama kepala Desa dan BPD bersama-sama melakukan program kerja kedepannya yang dibuat dalm peraturan Desa (PERDES). Sesuai dengan praturan Daerah Kabupaten Flores Timur No 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme penyusunan peraturan desa. dengan mekanisme dan pedoman ini maka di perlukan kerjasama yang baik pada tingkat pemerintahan desa, sehingga apapun yang di rumuskan oleh parah stakeholder ditingkatan desa bias berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat desa secara umum.

Desa bukit seburii II mendapatkan dana dari (ADD) sebesar Rp 76.823,445. ADD Merupakan Dana Dari Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan program. Rincian dana ADD Dapat Dilihat Secara Jelas dalam tabel di bawah ini,

Tabel 1.2
Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa

No	Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa	Jumlah
1	Membiayai Bidang Kerja	Rp 62. 821,445
2	Membiayai Operasional Kegiatan	Rp. 14. 001,700
Total		Rp. 76. 823,145

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Seburii II, 2016

Tabel di atas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa yang ada di desa bukit seburii II sebesar Rp 76.823,145 yang dipergunakan untuk membiayai bidang kerja dan operasional kegiatan.

Adapun kegiatannya adalah pengembangan infrastruktur. Jenis kegiatan dalam bidang infrastruktur yang disepakati adalah pembangunan talud pengaman banjir. Jenis kegiatan yang dipilih ini karena kondisi wilayah desa yang miring sehingga sangat sensitif untuk terjadinya banjir di kala musim hujan. Pembangunan talud pengaman banjir ini berada pada enam titik yang tersebar dalam desa tersebut. Enam titik lokasi pembangunan talud pengaman banjir tersebar di empat wilayah dusun dan di lokasi sekolah SD dan di lokasi puskesmas pembantu (PUSTU). Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 3.1 yang terdapat pada halaman 7.

Tabel 1.3

Lokasi Pembangunan talud Pengaman Banjir di desa bukit Sebiri II

No	Lokasi Pembangunan Talud Pengaman Banjir
1	Dusun Leter
2	Dusun Riang Mulawato
3	Dusun Waihelan
4	Dusun Pehan Getun
5	SDN Leter
6	PUSTU Bukit Sebiri II

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Sebiri II, 2016

Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam pembangunan ini yakni Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Pemanfaatan dan Tahap Evaluasi.

Berdasarkan tahapan- tahapan kegiatan diatas dan melalui pengamatan peneliti, ada beberapa permasalahan yang ditemukan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan tersebut adalah sebagian masyarakat yang kurang kehadirannya untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan talud pengaman banjir di mana adanya kemalasan untuk dating bergotong royong secara bersama- sama dan adanya ego wilaya di mana ada masyarakat yang hanya rajin dan semangat berpartisipasi di lokasi di mana dia berada hasil wawancara dengan kepala desa bukit sebiri II, Dominikus Sanga Nuba, (1 Agustus 2016). Ketidakhadiran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan karena penempatan lokasi pembuatan talud Pengaman Banjir memunculkan adanya indikasi bahwa penempatan lokasi pembuatan talud pengaman banjir lebih mengarah kepada area para pejabat desa tanpa

memprioritaskan pada lahan atau lokasi yang riskan banjir. Selain itu, ketika pemanfaatan hasil kerja yang di dalamnya termasuk pemeliharaan atau pelestarian talud pengaman banjir, masyarakat selalu apatis apabila bangunan talud pengaman banjir itu ada yang rusak akibat banjir di saat musim hujan.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Ruang lingkup penyaluran alokasi dana desa cukup luas, maka batasan dan rumusan masalah ini penulis maksudkan agar lebih mempertegas ruang lingkup kajian tentang pemanfaatan alokasi dana desa. Dan untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada agar lebih terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian di lakukan pada kantor desa bukit seburii II kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
2. Penelitian ini difokuskan Pada program Pemanfaatan Alokasi Dana Desa, Terkhusus Desa Bukit Seburii II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan ADD di Desa Bukit Seburii II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur ?
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD di Desa Bukit Seburii II Kecamatan Adonara Barat Kabupeten Flores Timur ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dengan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui Pemanfaatan ADD di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur.

2. Manfaat Penulisan

a. Secara Teoritis

Dalam Penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam hukum Administrasi Negara mengenai masalah- masalah yang berkaitan dengan tugas pokok pemerintahan desa dalam Pemanfaatan Alokasi dana desa.

b. Secara Praktis

Bagi pemerintahan desa Bukit Seburi II penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuahn tentang hal- hal yang berhubungan dengan tugas dan fungsi parah pemangku kebijakan desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dalam sebuah negara merupakan produk dari berbagai aktivitas yang melewati berbagai tahapan, dan diantara tahapan-tahapan tersebut saling terkait satu sama lain. Pembuatan kebijakan publik merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Karenanya, kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat dan memadai. proses perumusan kebijakan publik merupakan proses politik yang sangat kompleks, analitis, dan tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses tersebut sangat tidak pasti. EM Lukman Hakim (2011: 20) dalam bukunya yang berjudul Pengantar Administrasi Pembangunan mendefinisikan perumusan kebijakan merupakan serangkaian alternatif yang siapa dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada penyelesaian masalah publik. Kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah diharapkan mampu mengatasi kebutuhan atau harapan terhadap suatu kondisi yang mempunyai dampak bagi banyak pihak. Kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dijabarkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan baik pada tingkat nasional sampai pada tingkat

daerah. Suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan atau disahkan, tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah yang menjadi acuan dalam perumusan kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan yang telah dirumuskan dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut atau diistilahkan dengan implementasi kebijakan yang biasanya diterjemahkan ke dalam program-program aksi dan proyek. .

Kebijakan publik paling tidak mengandung tiga komponen dasar, yaitu:

1. Tujuan yang hendak dicapai
2. Sasaran Yang Spesifik, dan
3. Cara Mencapai Sasaran Tersebut.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004 : 77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan

masyarakat, dengan alasan; *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. *Kedua*, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Hulme dan Tunner (1990) dalam Priyono dan Pranarka (1996) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional.

Pada sisi lain, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

2. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut (Suharto, 2006:68) prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerjasama sebagai patner.
- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (Sutrisno,2005) ada lima macam yaitu

- a. Pendekatan dari bawah (bottom up approach)

Pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

- b. Partisipasi (participation)

Dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.

c. Konsep Keberkelanjutan

Yang merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dan dapat diterima secara social ekonomi.

d. Keterpaduan

Yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat.

C. Otonomi Desa

Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta bukan dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum public maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Dalam UU No 32 tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD yang menjadi mitra kerja. Menurut keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) No 64 tahun 1999 pasal 202 tentang struktur organisasi pemerintahan desa yaitu:

1. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Perangkat desa terdiri sekretaris desa dan perangkat desa lainnya

3. Sekretris desa yang dimaksud pada ayat dua diisi oleh pegawai negeri sipil

Desa merupakan lingkup wilayah terkecil yang diotonomikan karena susunan asli yang berdasarkan asal usul dan bersipat istimewa yang dapat menghidupkan kembali identitas kedaerahan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yakni merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas, wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam system pemerintahan nasional yang berada dalam di kabupaten/kota. Desa merupakan daerah yang diatonomi dibawah kecamatan. Didalam perubahan ini adalah adanya system pemisahan fungsi penyelenggara pemerintah Desa (eksekutif) dikontrol oleh BPD legislative).

Menurut Wijdaja (2003: 123) dalam melaksanakan Otonomi Daerah tak terlepas dari penyelenggaraan daerah serta termasuk Desa di pengaruhi, oleh beberapa factor yaitu::

1. Faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah dalam arti kata bahwa manusia harus memiliki moral yang baik untuk masa depan yang baik.
2. Faktor keuangan adalah merupakan tulang punggung dari terselenggaranya aktivitas terselenggaranya pemerintahan daerah.
3. Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan hal ini dilihat dari segi jumlah, kualitas dan.

4. Faktor organisasi dan manajemen tanpa adanya kemampuan organisasi dan manajemen yang memadai penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dapat dilakukan.

UU No 12 Tahun 2008 menunjukkan tiga pola otonomi yaitu: otonomi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, dan Desa sebagai otonomi asli. Untuk memperkuat pelaksanaan otonomi Desa diharapkan pemerintahan kabupaten mengupayakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada Desa untuk menggali potensi sumber daya alam yang ada dalam wilayahnya untuk dimampatkan sebagai sumber pendapatan Desa.
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintah, lembaga-lembaga serta komponen masyarakat lainnya di Desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan arahan.

Didalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 disebutkan bahwa didalam pemerintahan daerah kabupaten kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari kepala Desa dan perangkat Desa sebagai lembaga eksekutif dan BPD sebagai lembaga legislative Desa.

Menurut Abdullah (2005:167) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat.

Didalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pada pasal 7 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten kota yang pengaturannya kepada Desa.
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
4. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan kepada Desa.

Hak didalam melaksanakan pembangunan desa diatur dalam UU no 32 tahun 2004 yaitu pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga merencanakan pembangunan bagian wilayah desa menjadi wilayah pemukiman , industry dan jasa wajib desa dan BPD dalam merencanakan, dan pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari system pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, sehingga tercipta sistim perintahan demokrasi dan pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

Pemerintahan Desa dan BPD pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa. Secara aturannya tata cara pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati walikota melalui camat satu kali dalam satu tahun. dalam hal ini pihak kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara

pemerintahan Desa dan pemerintahan kabupaten kota, selain sebagai penghubung menurut PP No 72 tahun 2005 pasal 98 dan 102 disebutkan bahwa peran kecamatan adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan tersebut meliputi:

1. Mempasilitasi penyusunan peraturan Desa (perdes) dan peraturan kepala Desa.mempasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa.
2. Mempasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa.
3. Mempasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten kota yang diserahkan kepada Desa.
4. Mempasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangan lainnya.

D. Alokasi Dana Desa

1. Pengertian

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten.

2. Maksud dan Tujuan ADD

a. Maksud ADD

ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan ADD

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desamaka tujuan alokasi dana desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara dengan potensi yang ada.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

3. Ketentuan Penetapan ADD

Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah melalui ADD harus sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang besarnya dana ADD ditetapkan dengan rincian:

- a. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen.
- b. Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- d. Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara netto.
- e. Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- f. Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- g. Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.
- h. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara adil dan merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah, ditetapkan sebesar 70 persen sebagai Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM dari jumlah ADD dan 30 persen sebagai Alokasi Dana Desa Proposional atau ADDP dari jumlah ADD.

4. Perhitungan

Dalam pengalokasian Alokasi Dana Desa didasarkan pada perhitungan sebagai berikut:

- a. Perhitungan ADD untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.
- b. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
- c. Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya : kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, dan kesehatan). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
- d. Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil ditetapkan oleh daerah.
- e. Besarnya ADDM adalah 70 persen dari jumlah ADD dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 30 persen dari jumlah ADD.

5. Penetapan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Penetapan dan hasil perhitungan ADD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penetapan dan hasil perhitungan ADD dimaksud diberitahukan kepada desa selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.
- c. Data variabel independen utama dan variabel independen tambahan selambat-lambatnya dikirim oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten pada bulan Maret untuk penghitungan ADD tahun berikutnya.

6. Pengaturan Dan Pengelolaan

Untuk menimalisir bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan tanggung jawab.

- e. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

7. Hak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah desa

Sebagai pengelola dan penanggung jawab alokasi dana desa, pemerintah desa mempunyai sejumlah hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang perlu di hargai dan dilaksanakan.

a. Hak Pemerintah Desa

Menggunakan dana ADD untuk menyelenggarakan otonomi Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

b. Kewajiban Pemerintahan Desa

Dalam pengelolaan ADD, pemerintah desa wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal berikut ini.

1. Mengalokasikan dana ADD ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADD harus dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangdes dan

mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.

3. Mempertanggungjawabkan penyusunan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
6. Pemenuhan target PBB.

c. Tanggung Jawab Pemerintahan Desa

Tanggung jawab pemerintah sebagai pengendali semua kebijakan haruslah relevan dengan dengan seluruh ketentuan yang berlaku, ketentuan itu berupa :

1. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Membuat pertanggungjawaban penggunaan ke-uangan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
3. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang dari ADD kepada publik.

8. Prinsip dan Dasar-dasar Pengelolaan ADD

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut.

a. Prinsi-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip

berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanaka secara transparan-terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar pengelolaan

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perlu diketahui bahwa alokasi dana desa bukan merupakan bantuan melainkan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan desa sebagai wujud dari pemenuhan hak desa untuk penyelenggaraan otonomi desa.

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa;
- 5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
- 7) Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan.

9. Penggunaan

Alokasi Dana Desa digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dari jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Desa sebesar 70%.
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan belanja aparatur dan Desa yaitu untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa dengan prioritas sebagai berikut:
 - a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding
 - b) Biaya operasional Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.

- c) Biaya tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, Honor ketua RT dan RW serta penguatan kelembagaan RT / RW
- d) Biaya perawatan kantor dan lingkungan Kantor Kepala Desa.
- e) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, meliputi :

(1) Pembuatan/Perbaiki monografi, peta dan lain-lain data.

(2) Biaya lain-lain yang perlu dan mendesak, misalnya Penanganan keadaan darurat seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

- 2) Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan seperti:

a) Biaya Pemberdayaan Manusia dan Institusi. Penggunaanya:

(1) Pembinaan Keagamaan.

(2) Peningkatan kemampuan Pengelola Lembaga Usaha Milik Desa (BUMDES, LPMD, dsb) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

(3) Pelayanan kesehatan masyarakat terutama pada penanganan Gizi Balita melalui POSYANDU.

(4) Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK, Kesatuan Gerak PKK.

(5) Menunjang kegiatan Anak dan Remaja antara lain pengadaan sarana TPK, TK, sarana Olahraga, Karangtaruna dll.

- (6) Bantuan kepada lansia, jompo, cacat.
- (7) Operasional LPMD
- (8) Operasional Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- (9) Biaya Musrenbang dan serap aspirasi tingkat dusun / lingkungan

(10) Peningkatan keamanan dan ketentraman Desa.

b). Biaya Pemberdayaan Lingkungan. Penggunaannya meliputi:

- (1) Pembangunan/biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil atau sarana perekonomian Desa seperti pembuatan jalan, talud/irigasi, jembatan, los pasar, lumbung pangan dll.
- (2) Untuk penghijauan / tanaman hortikultura.
- (3) Sarana menunjang kesehatan lingkungan ,jamban keluarga.
- (4) Untuk menunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi local

c). Biaya Pemberdayaan usaha/ ekonomi. Penggunaannya meliputi:

- (1) Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui modal usaha dalam bentuk BUMDes, , Badan Perkreditan Desa dan lembaga lainnya.
- (2) Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk.
- (3) Biaya untuk pengadaan Pangan

Alokasi Dana Desa untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di sesuaikan dengan kebutuhan, prioritas secara seimbang dan sesuai kemampuan keuangan (ADD) yang diterima oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah tentang penggunaan ADD.

10. Tahapan Pelaksanaan

a. Tahap Persiapan

- 1) Pembentukan kelembagaan Pengelola Alokasi Dana Desa.
- 2) Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

b. Tahap Perencanaan

- 1) Kepala Desa mengadakan sosialisai pelaksanaan ADD dan Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa membuat rencana detail tentang penggunaan Alokasi Dana Desa untuk penyelenggaraan.
- 3) Kepala Desa bersama LPMD dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang Alokasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- 4) Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

c. Tahap Pelaksanaan

- 1) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan, maka Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program yang didanai dari ADD
- 2) Alokasi dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemerintahan.
- 3) Alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh Tim Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

d. Tahap Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pengawasan

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- 3) Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

- 5) Pengendalian, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksana Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa, Tim Pengendali Tingkat kecamatan, dan Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten.
 - 6) Monitoring dan pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pendamping/Asistensi
- e. Tahap Pelaporan
- 1) Pelaporan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang mencakup:
 - a) Perkembangan kegiatan dan penyerapan dana.
 - b) Masalah yang dihadapi dan pemecahannya.
 - c) Pencapaian hasil penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
 - 2) Pelaporan ADD meliputi:
 - a) Pelaporan Kegiatan
 - (1) Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pengendali Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan menyampaikan laporan dari seluruh laporan Tim Pelaksana ADD Tingkat Desa kepada Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap 3 bulan.
 - (3) Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten merekap seluruh laporan dari Tim Pengendali dan melaporkan kepada Bupati.

b) Pelaporan Keuangan

(1) Pelaporan keuangan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan secara teknis dilaksanakan oleh Bendahara Desa.

(2) Pelaporan dilaksanakan setiap tahapan penerimaan ADD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(3) Pelaporan keuangan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

f. Tahap Penyelesaian Pekerjaan

Setelah pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana selesai dilaksanakan, maka Tim dimaksud menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Tahap pemeliharaan dan Pelestarian

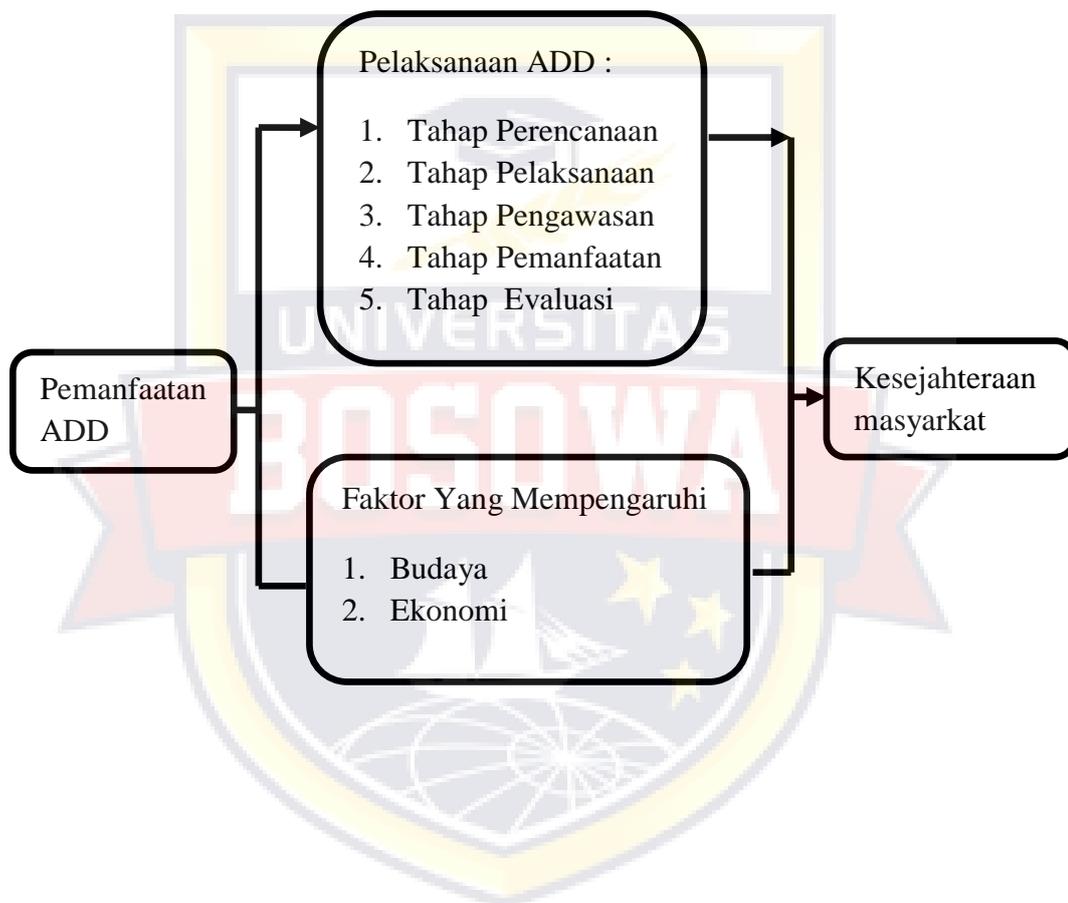
Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didanai Aloksi Dana Desa pada dasarnya adalah untuk pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sehingga masyarakat harus bisa memiliki dan menikmati, maka untuk pelestarian atau keberlangsungan kegiatan menjadi tanggung jawab masyarakat dan kelompok sasaran.

E. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini di kemukakan kerangka konsep yang

berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1. Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian perlu melihat ciri atau cermin dari sebuah daerah yang mau menjadi objek penelitian, maka tipe dan dasar penelitian harus perlu diperhatikan. tipe dan dasar penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
2. Dasar penelitian yang digunakan adalah survey, yang bertujuan untuk mengumpulkan data observasi dan interview, dengan ciri khusus dan kesimpulannya mencerminkan hanya untuk daerah yang bersangkutan.

B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dikemukakan, maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan pendekatan induktif, yaitu mendeskripsikan keadaan lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang sebenarnya

Menurut Moleong (2007: 6-7) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sebuah dokumen yang sangat penting dalam menunjang kegiatan penelitian, sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Data Primer adalah : data utama, yang masih perlu pengolahan melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Dalam hal ini sumber data diperoleh melalui teknik wawancara dari beberapa informan yang sudah ditentukan sebelumnya karena dianggap tahu dan arena posisi dan jabatannya yang terkait langsung dengan masalah dalam penelitian ini. Data primer ini berupa antara lain :
 - a) Hasil wawancara dari informan penelitian
 - b) Hasil observasi peneliti ke lapangan secara langsung dalam bentuk catatan tentang situasi dan kejadian.
2. Data Sekunder merupakan data yang terkait dengan penelitian yang sudah diolah berupa dokumen – dokumen. Data ini di gunakan untuk informasi dari informan maupun dari observasi langsung ke lapangan.

D. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini, tidak di kenal namanya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam focus penelitian ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar- benar mengetahui persoalan dan permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data- data yang dapat membantu dalam memahami persolan dan permasalahan tersebut.

Menurut Suyanto (2005 : 172) informen penelitian meliputi beberapa macam yaitu: 1) informan kunci (*keyinforman*) merupakan mereka yang mengetahui atau memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. 2) Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti. 3) informan biasa merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi social yang diteliti.

1. Informan kunci berjumlah satu orang yaitu :

Berhubung penelitian ini berjudul Pemanfaatan Alokasi Dana desa, di Desa Bukit seburu II, maka peneliti mengambil kepala desa Bukit Seburu II sebagai informan kunci dalam penelitian ini, dikarenakan kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam instansi tersebut.

2. Informen utama berjumlah lima orang yaitu :

Untuk memperoleh informasi yang akurat, maka penulis membutuhkan informasi tambahan agar penelitian dapat memiliki data yang otentik, sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu penulis mengambil 5 orang sebagai informen utama, diantaranya:

Kepala urusan yang di bagi dalam bidang- bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidangnya masing- masing.

3. Informen biasa adalah seluruh Masyarakat dan tokoh Masyarakat yang ada di Desa Bukit Seburi II paling kurang 13 orang.

E. Deskripsi Fokus Dan Indikator Penelitian

Berdasarkan permasalahan – permasalahan terkait dengan pemanfaatan ADD di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat kabupaten Flores Timur, peneliti menfokuskan pada penelitian Pemanfaatan ADD di Desa Bukit Seburi II. Peneliti fokus pada penggunaan ADD serta peran serta masyarakat dalam meningkatkan infrastruktur demi pembangunan desa. adapun fokus penelitian tersebut berupa :

1. Implementasi Pemanfaatan ADD, dengan fokus kegiatan adalah:

- a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap perencanaan kegiatan dilakukan beberapa tahap musyawara untuk menentukan kegiatan program yang dilaksanakan. Rapat penggalan gagasan hingga pada rapat pelaksanaan yang diselenggarakan oleh TPK dan diikuti oleh seluruh masyarakat sebagai pelaku program tersebut

- b. Tahap Pelaksanaan

Musyawara pelaksanaan merupakan tahap musyawara persiapan pelaksanaan kegiatan program ADD. Dalam musyawara pelaksanaan ini yang menjadi agenda adalah kapan dimulai, mulai dari lokasi mana dan bagaimana strategi pelaksanaan kegiatan tersebut

c. Tahap Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah desa, TPK maupun masyarakat bertujuan untuk menjamin kelancaran pekerjaan, pengawasan tersebut lebih mengarah kepada pengawasan teknis agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan juga kualitas bangunan dapat terjamin pula

d. Tahap Pemanfaatan

Dalam tahap pemanfaatan ini termasuk didalamnya adalah perawatan. Demi perawatan terhadap fisik bangunan alud pengaman banjir maka terbentuklah tim perawatan. Tim perawatan ini bertugas untuk memantau kondisi fisik bangunan demi menjaga kemungkinan terjadinya kerusakan pada fisik bangunan tersebut.

e. Tahap Evaluasi

Evaluasi proses kegiatan dilakukan setiap kali kegiatan pekerjaan talud pengaman banjir dilaksanakan. Evaluasi ini bisanya dilakukan pada sore hari sesudah kegiatan seharian dilakukan. Evaluasi ini bertujuan agar masyarakat mampu menilai seberapa besar hal-hal yang masih kurang dan seberapa besar hal-hal positif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan seharian itu

2. Pencapaian Tujuan pemanfaatan ADD adalah :

a. Kesejahteraan Masyarakat Desa

Kesejahteraan sosial menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial

warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. kehidupan yang layak merupakan impian semua warga masyarakat, seperti halnya masyarakat di Desa Bukit Seburi II mereka ingin hidupnya nyaman di musim hujan, maka opsi yang ditawarkan dari proram ADD adalah pembuatan talud pengaman banjir,

F. Instrumen Penelitian

Penelitian pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi II kecamatan Adonara Barat kabupaten Flores Timur, instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri. Dengan alat bantu berupa pedoman wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.

Menurut Moleong (2007 : 9) dalam Penelitian Kualitatif,

“peneliti merupakan alat (instrument) pengumpulan data utama, karena peneliti adalah manusia yang dapat berhubungan dengan dengan informan, serta mampu memahami kaitan kenyataan- kenyataan di lapangan”

Oleh karena itu, peneliti juga berperan serta dalam pengamatan atau. Peneliti juga menggunakan alat- alat bantu untuk data seperti tape recorder, video kaset atau kamera. Tapi kegunaan atau pemanfaatan alat alat ini sangat tergantung pada sendiri.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara (interview) untuk memperoleh data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang telah ditentukan dengan pedoman wawancara.

2. Observasi (pengamatan) dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung pada obyek yang akan diteliti.

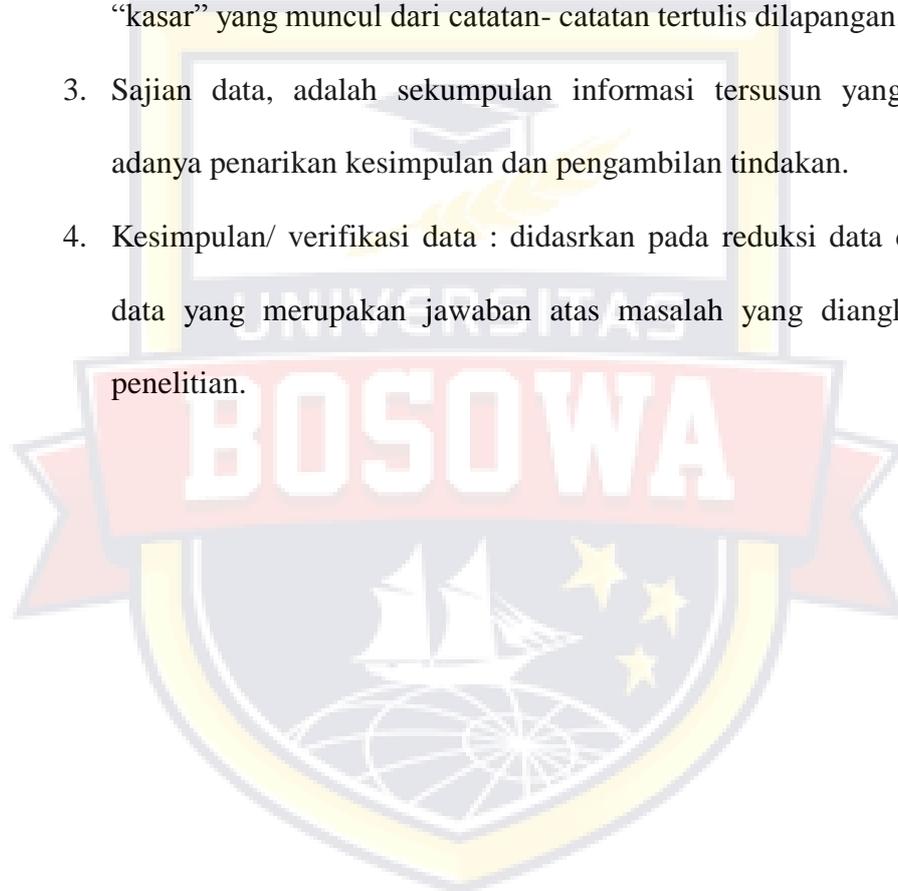
3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen, buku- buku, karya ilmiah, pendapat parah ahli dan literature lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut patton dalam bukunya moleong (2000 : 103), adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar. Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif yaitu : data yang terkumpul dan dianalisis kemudian dideskripsikan. Dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang efektifitas pentaluran alokasi dana desa di desa Bukit Seburii II Kecamatan Adonara Barat kabupaten Flores Timur.pengelolaan data dalam penelitian ini di lakukan dengan 4 (empat) tahap, sesuai dengan pendapat Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (1992 : 16- 20), yaitu:

1. Pengumpulan data (*field note*) peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan interview di lapangan
2. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data- data “kasar” yang muncul dari catatan- catatan tertulis dilapangan.
3. Sajian data, adalah sekumpulan informasi tersusun yang member adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Kesimpulan/ verifikasi data : didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Bukit Seburi II

Desa bukit seburi II merupakan desa yang dimekarkan dari desa induk desa bikit seburi. Demi tuntutan akan pendekatan pelayanan kepada masyarakat maka desa bukit seburi II secara resmi disahkan pada tanggal 06 maret 2000 di tobilota, dengan pejabat sementara bapak Ignasius Kopong Tukan. Desa bukit seburi II ketika dimekarkan dengan tiga (3) wilayah Dusun, 12 wilayah RT. Dalam perjalanan roda pemerintahan desa dilaksanakan pemilihan kepala desa yang pertama dan Bapak Matias Sanga Helan terpilih sebagai kepala desa dua periode dan digantikan oleh Bapak Dominikus Sanga Nuba, Yang pada saat ini masih menjabat.

Desa bukit seburi II dalam perjalanan roda pemerintan desa, dan untuk pendekatan pelayanan maka desa bukit seburi II kembali memekarkan wilayah dusun,yakni 4 wilayah dusun dusun, 8 RW dan 16 RT. Sejalan dengan itu pembangunan juga dilaksanakan disegenap aspek kehidupan, baik infrastruktur, Hukum, kesejatraan dan budaya.

1. Keadaan Geografis

Desa Bukit Seburi II merupakan salah satu desa dari 16 desa yang terdapat di kecamatan Adonara Barat, kabupaten Flores Timur. 16 desa tersebut diataranya adalah, Desa Bukit Seburi I,Bukit Seburi II,Nimun Danibao, Danibao, Ilepati, Wure, Kimakamak, Hurung,

Pajinian, Waiwadan, Duanur, Waitukan, Tonuwoten, Watobaya, Bugalima dan Desa Homa. Desa- desa ini terletak di wilayah selatan kecamatan Adonara Barat Dengan Ibu Kota Kecamatan Waiwadan. Jarak Tempuh dari ibu kota Kabupaten Ke wilayah kecamatan Kurang lebih 28 kilometer, dan dari ibu kota kecamatan Ke desa kurang lebih 7 kilometer. Wilayah desa ini secara geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Bagian timur berbatasan dengan Desa Kokotobo (Adonara Tengah)
- b. Bagian Barat Berbatasan Dengan Desa Bukit Seburi I
- c. Bagian Utara Berbatasan Dengan Desa Tonuwoten
- d. Bagian Selatan Berbatasan Dengan Desa Dawata'a (Adonara Timur)

Luas wilayah desa bukit Seburi II $\pm 58,88^2$ M² terdiri dari 4 dusun yaitu dusun leter, dusun Riangmulawato, dusun waihelan dan Dusun pehan getung. Dengan 8 RW, dan 16RT. Keadaan topografi desa secara umum terdiri atas bukit dan daratan dengan ketinggian 200M di atas permukaan laut, dengan suhu 25-34 °c. Daerah ini memiliki iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Keadaan musim ini memiliki rentang waktu yang sama dimana musim hujan berkisar dari bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober.

2. Keadaan Demografis

a. Keadaan penduduk Menurut jenis kelamin dan KK

Jumlah penduduk Desa Bukit seburii II berdasarkan data monografi desa akhir tahun 2010 adalah sebanyak 750 jiwa, dengan komposisi laki-laki berjumlah 367 jiwa dan perempuan berjumlah 383 jiwa. Desa Bukit Seburii II terbagi atas empat (4) wilayah, dusun I meliputi wilayah Leter, dusun II meliputi wilayah waihelan dan dusun IV meliputi wilayah pehang getung sebaran penduduk dari ke-empat dusun yang ada berbeda-beda, berdasarkan jumlah, jenis kelamin maupun kepala keluarga. Sebaran penduduk Desa Bukit Seburii II dapat dilihat pada tabel 4.1 yang terdapat pada halaman di bawah ini

Tabel 4.1
Sebaran penduduk desa Bukit seburii II
berdasarkan jenis kelamin dan KK tahun 2016

NO	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah	KK
		Laki- Laki	Perempuan		
1	Dusun I	90	100	191	42
2	Dusun II	67	70	137	32
3	Dusun III	124	131	255	60
4	Dusun IV	86	81	167	34
Jumlah		367	383	750	168

Sumber : Data Desa Bukit seburii II tahun 2016

Dari table di atas, secara keseluruhan dari jumlah penduduk desa bukit seburi II berjumlah 750 jiwa, yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak yakni 383 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berjenis elamin laki- laki yakni 367 orang, lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan disebabkan karena laki- laki yang sudah manginjak dewasa, ia akan keluar dari daerahnya untuk mencari kerja di daerah lain di mana mereka merasa tertekan dengan segala tuntutan keluarga karena kebutuhan ekonomi.

Dari tabel di atas juga menunjukan bahwa adanya perbedaan sebaran penduduk pada setiap wilayah dusun, dimana dari keempat dusun tersebut wilayah dusun III yang lebih banyak penduduknya dibandingnkan wilayah dusun I, dusun II, dan dusun IV, perbedaan sebaran penduduk inidiakibatkan wilyah dusun III terletak dibahwa kaki gunung yang memudahkan masyarakat untuk mengelolah hasil pertaniannya karena didukung oleh tanah yang subur.

b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil pendapatan penduduk menurut umur oenduduk desa bukit seburi II dalam kondisi yang relative untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 pada halaman 48.

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Desa Bukit Seburii II
Menurut Umur Tahun 2016

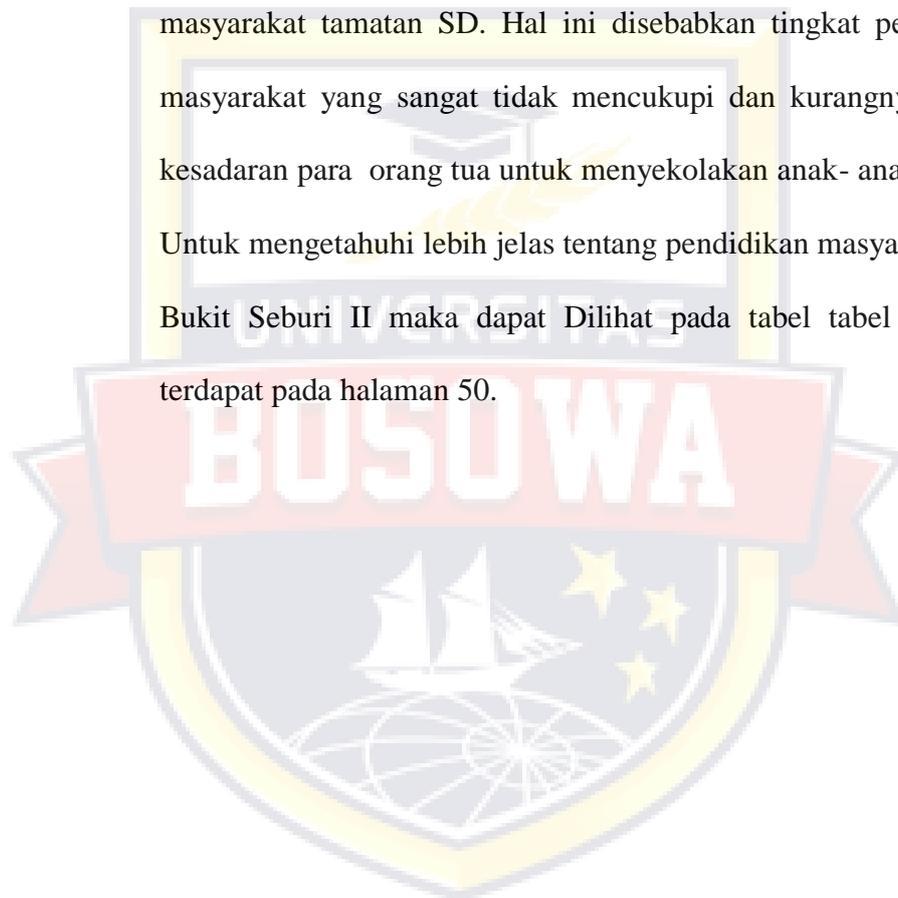
No	Umur/ Tahun	Jumlah Jiwa	Persentasi
1	0 – 5	43	5, 73
2	6 – 10	67	8, 93
3	11 – 15	45	6
4	16 – 20	65	8, 67
5	21 – 25	95	12, 66
6	26 – 30	86	11, 46
7	31 – 35	62	8, 26
8	36 – 40	82	10, 93
9	41 – 45	65	8, 67
10	46 – 50	74	9, 86
11	51 – 55	34	4, 53
12	56 ke Atas	58	7, 73
Total		750	100

Sumber : Data Desa Bukit seburii II tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa usia atau umur penduduk yang dominan umumnya antara usia 21- 25 yakni 95 jiwa (12, 66%), kemudian 56 ke atas 58 jiwa (7, 73%). Namun terdapat pula diantaranya masih berusia balita antara 0- 5 tahun yakni 43 jiwa (5, 73%). Perbedaan penduduk dalam persebaran penduduk berdasarkan tingkat umur atau usia Desa Bukit Seburii II disebabkan oleh factor mobilisasi penduduk. Mobilisasi penduduk dalam hal ini angka kelahiran, kematian, dan juga mutasi penduduk (perpindahan Penduduk)

c. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Bukit Seburi II berdasarkan tabel di atas rata-rata masih sangat rendah karena sebagian besar masyarakat tamatan SD. Hal ini disebabkan tingkat penghasilan masyarakat yang sangat tidak mencukupi dan kurangnya tingkat kesadaran para orang tua untuk menyekolakan anak-anak mereka. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pendidikan masyarakat desa Bukit Seburi II maka dapat dilihat pada tabel 4.3 yang terdapat pada halaman 50.



Tabel 4. 3
Golongan Penduduk Desa Bukit Seburi II
Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2116

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah jiwa	Persentase
1	Belum Sekolah	73	9, 73
2	SD	120	16
3	Tamat SD	250	33, 33
4	Tidak Tamat SD	93	12, 4
5	SMP	45	6
6	Tamat SMP	39	5, 3
7	Tidak Tamat SMP	15	2
8	SMA/SMU	35	4, 66
9	Tamat SMA/SMU	31	4, 14
10	Tidak Tamat SMA/SMU	7	0, 93
11	Perguruan Tinggi	2	0, 26
12	Tamat Perguruan Tinggi	5	0, 66
13	Tidak Pernah Sekolah	35	4, 66
	Total	750	100

Sumber : Data Desa Bukit seburi II tahun 2016

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan sebbagian besar penduduk bervariasi. Tabel ini menunjukkan tingkat pendidikannya masih rendah, karena kategori perguruan tinggi berjumlah 35 jiwa (0, 66%), selain itu juga tidak pernah sekolah 35 jiwa (4, 66%) dan sementara itu SD120 Jiwa (16%).

d. Golongan Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Berdasarkan data monografi desa Penduduk desa Bukit Seburi II memiliki Pekerjaan yang relative berbeda, namun

sebagian besar masyarakat desa bukit seburii II pada umumnya adalah bertani, relatifnya jumlah penduduk yang bekerja pada sector lain terutannya disebabkan keterbatasan keterampilan yang dimiliki maka jalan yang ditempuh adalah bertani, dimana cara kerjanya masih relatif tradisional sesuai dengan kenyataan yang diperoleh penduduk yang bergerak di Bidang lain sangat sedikit. Untuk lebih jelas maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 4.4
Golongan Penduduk Desa Bukit Seburii II
Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Jiwa	Persentase
1	Petani	520	69,33
2	PNS	9	1,2
3	Tukang	8	1,66
4	Wiraswasta	8	1,66
5	Lain- Lain	205	27,33
	Total	750	100

Sumber : Data Desa Bukit seburii II tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penduduk yang bekerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja di bidang lain di mana penduduk yang bekerja di bidang pertanian 520 jiwa (69,33%) sedangkan di bidang yang lainnya terlihat sangat kecil yaitu PNS berjumlah 9 jiwa (1,2%) tukang berjumlah 8 jiwa (1,66%) Wiraswasta 8 jiwa

(1,66%) sedangkan lainnya tergolong usia non produktif berjumlah 250 jiwa (27,33%).

e. Keadaan Penduduk Menurut Agama Dan Kepercayaan

Agama merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena lewat agama dan kepercayaan dapat membina iman dan taqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penduduk desa bukit seburii II selurunya beragama Kristen Khatolik.

Di samping agama Kristen Khatolik yang di anut oleh masyarakat desa Bukit Seburii II, mereka juga percaya akan Nilai-nilai tradisional yang merupakan peninggalan dari para leluhur. Nilai-nilai tradisional inilah yang mengatur dan menjaga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini dapat dikatakan sebagai kepercayaan animisme masih ada dalam masyarakat desa Bukit Seburii II.

3. Keadaan Ekonomi dan Budaya

Masyarakat desa Bukit Seburii II bersifat Homogen. Bersifat homogeny karena kondidi masyarakat desa Bukit Seburii II adalah serumpun.hubungan kekerabatan sangat dekat, solidaritas sangat tinggi, dan masyarakat menganut agama yang sama yakni Agama Kristen Khatolik, serta mata pencaharian dimonopoli oleh petani bahkan sebagian besarnya bertani. Dalam kaitannya dengan keadaan ekonomi tersebut, homogenitas masyarakat merujuk pada kebiasaan

gotong- royong dalam bekerja yang dilakukan oleh masyarakat desa. Seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini, dalam masyarakat ada pergeseran nilai serta menyesuaikan diri dengan masyarakat lainnya. Kini ada pergeseran dari cara hidup bertani yang tradisional menuju pola bertani yang modern serta pola hidup wiraswasta dan bisnis. keadaan Desa Bukit Seburi II yakni topografi yang sangat subur maka penduduk desa hidup sebagai petani.

Desa Bukit Seburi II cocok untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, umbi- umbian dan kacang kacangan serta lainnya. Selain tanaman perkebunan seperti cengkeh, kemiri, kakao, lada, pinang, dan lainnya. Dengan keadaan di Desa Bukit Seburi II merupakan salah satu desa yang menghasilkan komoditi perdagangan di Adonara Barat.

Desa Bukit Seburi II dengan ciri khas budaya monogen dengan rumpun masyarakat dari suku Lamaholot. Sebagai rumpun suku Lamaholot Desa Bukit Seburi II Juga Memiliki Budaya Lokal dan kearifan local lainnya sebagai kekeyaan masyarakat setempat. Budaya lokal seperti tradisi makan jagung (*wu'un loln*), tradisi belis (*gute Bala*) dan tradisi lainnya. Desa Bukit Seburi II dihuni suku- suku kecil dengan ciri dan budaya local yang sama. Suku- suku yang menghuni Desa Bukit Seburi II antara lain : Suku Selan, Suku Tukan, Suku Lein, Suku Sanga, Suku Lusi Dei, Suku Nara, Suku Goalamanu, Dan suku Kecil lainnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Pelaksanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bukit Seburi Ii Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur

Penelitian mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, meliputi lima aspek penelitian yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan, serta partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan dan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi. Peneliti mengumpulkan data, kemudian memilah- milahkan data berdasarkan aspek penelitiannya dan selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi II dilakukan Dalam beberapa Tahap namun sebelum memasuki tahap kegiatan program tersebut didahulukan dengan musyawarah pemilihan tim pengelola kegiatan (TPK) program. Bedarkan wawancara yang dilakukan kepada kepala Desa bukit Seburi II, *Dominikus Sanga Nuba* menyatakan bahwa :

“Ketika ADD hadir di Desa Bukit Seburi II, saya sebagai kepala desa dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas dana ADD memimpin rapat bersama masyarakat untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di desa bukit seburi II telah hadir dana ADD sekaligus pada rapat yang sama kami membuat pemilihan Tim Pengelolah Kegiatan (TPK) yang diketuai oleh Bapak Marselinus Pati Doni dan beranggotakan empat orang lainnya. Dengan terpilihnya Tim Pengelolah Kegiatan, Saya menyerahkan Proses kegiatan ini kepada tim (01 Agustus 2016)”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bukit Seburi II ini, bahwa sesuai dengan juknis Program. Kepala Desa Adalah Penanggung Jawab Dana ADD di desa dan menyelenggarakan Pemilihan Tim pengelolah Kegiatan (TPK) di desa. Tim pegelolah inilah mengelolah proses kegiatan program sesuai dengan tahapan- tahapan kegiatan. Tim pengelolah yang dipilih,direkrut dari warga masyarakat yang dianggap mampu mengelolah kegiatan tersebut. Sementara setiap dusun mengajukan calonnya untuk mewakili masyarakat dari dusunnya. Tim pengelolah kegiatan terdiri atas lima orang yang terbagi menjadi seorang ketua, seorang sekretaris dan tiga orang anggotanya. Mereka dipilih secara langsung oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan program ADD dilaksanakan dalam beberapa Tahap program adalah sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

Program ADD didesa Bukit Seburi II Yang diporsikan Kewilayah Kerja Infrastruktur dengan bidang kerja yang dipilih melalui tahap perencanaan di lakukan dalam beberapa tahap pula. Hal ini juga digambarkan oleh ketua

tim pengelolah kegiatan , *Marselinus Pati Doni* dalam wawancara mengatakan bahwa ;

“ADD yang diturunkan di Desa Bukit Seburu II ini,dalam tahap perencanaan itu dilakukan dalam beberapa tahap musyawara yaitu : pertama musyawara penggalian gagasan, kedua musyawara penetapan prioritas, ketiga musyawara perengkingan, keempat musyawara pendanaan dan kelima musyawara pelaksanaan. Tahap musyawara ini dibuat bersama masyarakat dalam tahap perencanaan program. (02 Agustus 2016).

Dalam tahap perencanaan kegiatan dilakukan beberapa tahap musyawara untuk menentukan kegiatan program yang dilaksanakan. Rapat penggalian gagasan hingga pada rapat pelaksanaan yang diselenggarakan oleh TPK dan diikuti oleh seluruh masyarakat sebagai pelaku program tersebut.

Sementara di lain pihak dalam wawancara bersama *Bapak Ignasius Raya Lein* mengatakan bahwa :

“sebelum kegiatan dilaksanakan, di desa dilaksanakan pertemuan bersama untuk menentukan apa yang harus kami kerjakan dalam program itu. Kami semua masyarakat datang untuk ikut pertemuan. Sampai pada akhirnya kami menentukan untuk membuat talud pengaman banjir; (02 Agustus 2016).”

Selain itu juga menurut informen lainnya bahwa musyawara yang dilakukan oleh masyarakat tersebut merupakan tahapan musyawara dalam kategori tahap perencanaan.

Musyawara – musyawara dalam tahap perencanaan program yang dilakukan di desa adalah sebagai berikut :

a. Musyawara penggalan Gagasan

Pada Musyawara Penggalan gagasan, segenap warga masyarakat dating dan ikut dalam musyawara tersebut. Dalam musyawara ini, melalui tim pengelola masyarakat menentukan apa yang harus mereka kerjakan dalam kegiatan program. Berdasarkan petunjuk teknis kegiatan, dalam musyawara penggalan gagasan ini, masyarakat desa bukit seburu II secara bersama menyepakati bidang pengembangan infrastruktur menjadi prioritas dalam program ini.

wawancara dengan sekian informen menyatakan hal yang serupa bahwa bidang infrastruktur menjadi prioritas program. Salah seorang informen yang bernama *Fransiskus Laga Doni*, mengatakan bahwa :

“Kami seluruh masyarakat sepakat bahwa ADD dipakai untuk pembangunan fisik karena kami sangat membutuhkan pembangunan fisik agar kami bisa maju dan kami bisa memenuhi kebutuhan hidup kami lainnya. Banyak sekali pembangunan fisik yang kami butuhkan seperti semenisasi jalan raya, pembuatan parit, pembuatan talud pengaman banjir, rabat lorong, pembuatan pagar sekolah dan lainnya; (03 Agustus 2016).”

Bidang pengembangan infrastruktur menjadi prioritas dari dana ADD di Desa Bukit Seburu II. Pembangunan fisik kini menjadi kebutuhan masyarakat. Bangunan fisik yang menjadi usulan masyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung menunjukkan adanya semangat partisipatif untuk membangun desa. Usulan- usulan masyarakat ini dihimpun dalam musyawara penggalan gagasan. Di sini menunjukkan adanya kontribusi pemikiran berupa ide dan gagasan dari masyarakat secara partisipatif dalam upaya membangun desa.

b. Musyawara penetapan Prioritas dan Perengkingan

Setelah musyawara penggalan gagasan akan dilanjutkan dengan musyawara penetapan prioritas dan perengkingan. Pada musyawara ini, masyarakat menetapkan apa yang harus dikerjakan sebagai kegiatan dari program ADD dalam bidang pengembangan infrastruktur. Berdasarkan usulan masyarakat yang dijangin pada musyawara penggalan gagasan tersebut dan sesuai dengan perengkingan prioritas Yang dibuat berdasarkan usulan tersebut maka menghasilkan bidang kerja pembuatan talud pengaman banjir. Menurut pengakuan informen yang ditemukan bahwa bidang kerja talud pengaman banjir merupakan hasil musyawarah. Talud pengaman banjir merupakan prioritas kegiatan program ADD di Desa Bukit Sebur II.

Menurut Informen yang bernama *Lusia Ebo Teron*, mengatakan bahwa

“Dalam musyawara penetapan prioritas tersebut kami menyepakati bidang kerja program ADD adalah pembuatan talud pengaman banjir. Pembuatan talud pengaman disepakati karena keadaan desa kami miring. Pada musim hujan sering terjadi banjir. Kami ingin nyaman pada musim hujan jadi kami sepakat untuk membuat talud pengaman banjir ; (04 Agustus 2016)”

Dalam temuan dengan informen menyatakan bahwa pembuatan talud pengaman banjir disepakati oleh masyarakat karena kondisi desa bukit sebur II dengan topografi miring dan berbukit- bukit. Keadaan desa ini sering terjadi banjir pada musim hujan. Dengan pembangunan talud

pengaman banjir tersebut masyarakat dapat merasa nyaman pada musim hujan.

Dengan demikian, talud pengaman banjir merupakan prioritas pembangunan desa melalui dana ADD. Talud pengaman banjir merupakan salah satu dari sekian usulan masyarakat. Namun dalam perengkingan kegiatan berdasarkan usulan tersebut talud pengaman banjir menempati rengking pertama. Ini berarti pembuatan talud pengaman banjir menjadi prioritas kerja dalam program ADD di Desa Bukit Seburu II. Penetapan prioritas ditelorkan dalam musyawara mufakat dan merupakan inisiatif masyarakat sendiri dalam membangun desa secara partisipasi.

c. Musyawara Pendanaan

Musyawara pendanaan merupakan musyawara yang didahului oleh dengan kegiatan survey fisik oleh tim teknis. Setelah adanya survey fisik dilakukan musyawara pendanaan di mana dalam musyawara ini menentukan besarnya anggaran biaya untuk pembuatan talud pengaman banjir. Namun hal ini, rancangan anggaran biaya kegiatan program menjadi tanggung jawab Tim Pengelolah kegiatan.

Sekian informen menyatakan bahwa musyawara pendanaan disahului dengan survey fisik. Menurut salah seorang informen bernama *Paulina Helan Pati*, menyatakan bahwa :

“Kami masyarakat juga terlibat bersama untuk cek lokasi pembuatan talud pengaman banjir di wilayah Desa; (04 Agustus 2016)”

Dalam tahap musyawara ini, didahulukan dengan survey yang mana masyarakat bersama tim mengamati lokasi yang akan dibangun talud pengaman banjir. Dengan kehadiran masyarakat tersebut menunjukkan adanya semangat partisipasi akan terlaksananya kegiatan dari program ADD tersebut.

d. Musyawara Pelaksanaan

Musyawara pelaksanaan merupakan tahapan lanjutan dari musyawara penggalan gagasan, musyawara penetapan prioritas, dan musyawara pendanaan. Dalam musyawara pelaksanaan dibahas mengenai kapan waktu pelaksanaan, dimulai dari lokasi mana dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kegiatan. Menurut informan yang ditemui menyatakan bahwa selain hal teknis yang dibahas namun motifasi untuk memberi semangat supaya terlibat dan bekerja dalam kegiatan program juga sangat penting artinya masyarakat saling member dorongan selai kepada Desa dan TPK. Menurut salah seorang informen bernama *Bapak Thomas Libu* menuturkan bahwa

“Pada musyawara pelaksanaan ini kami diberi dorongan untuk semangat bekerja membangun desa kami melalui program ADD selain persiapan- persiapan lainnya; (04 Agustus 2016).”

Musyawara pelaksanaan merupakan tahap musyawara persiapan pelaksanaan kegiatan program ADD. Dalam musyawara pelaksanaan ini yang menjadi agenda adalah kapan dimulai, mulai dari lokasi mana dan bagaiman strategi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Menurut pengamatan peneliti pada tahap perencanaan melalui setiap tahap musyawara bahwa pada setiap jenjang musyawara yang dilalui tidak dihas mengenai lokasi sasaran pembangunan talud pengaman banjir. Lokasi dengan kriteria seperti apa yang harus didahulukan yang akan dibangun pada setiap lokasi pembangunan talud diwilaya desa yang tersebar kedalam empat dusun. Tidak diperhatikan hal seperti ini akhirnya penempatan pembangunan lokasi sesuka hati sesuai dengan keinginan orang tertentu. Hal tersebut mengindikasikan kecemburuan social yang mana talud pengaman banjir cenderung dibangun atau didahulukan diarea parah pejabat desa. Hal ini berakibat pada penurunan keterlinitan masyarakat dalam proses pelaksanaan.

Pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, pendapat dan gagasan sangat diperlukan. Pada tahap perencanaan dimulai dengan musyawara- muusyawara dilakukn sebanyak dua hari. Hari pertama dilakukan dengan musyawara penggalian gagasan dan penetapan prioritas sedangkan hari kedua dilaksanakan musyawara pendanaan dan musyawara pelaksanaan. Masyarakat terlibat dan memberikan ide dan gagsan dalam tahap ini. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Masyarakat sendiri mmenyepakati dan pada akhirnya pula masyarakatlah yang melaksanakannya.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari proses perencanaan. Segala apa yang direncanakan secara partisipatif oleh segenap warga masyarakat selanjutnya dilaksanakan secara partisipatif oleh segenap warga masyarakat itu pula. Proses pelaksanaan program ADD dengan kegiatan prioritas pembuatan talud pengaman banjir mulai sejak September.

Secara normatif, pelaksanaan program ADD dilaksanakan dengan dua system yaitu structural dan fungsional. Sistem struktural berarti pelaksanaan program melibatkan pihak pengelola dalam hal ini TPK dan pemerintah Desa. Sedangkan system fungsional menuntut partisipasi segenap warga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan program. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan talud pengaman banjir merupakan tolak ukur akan sukses tidaknya program ADD di Desa Bukit Seburu II. Informen yang ditemui mengatakan hal yang sama bahwa masyarakat selalu terlibat dalam proses pelaksanaan. Menurut salah seorang informan *Bapak Pius Pehan* menyatakan bahwa :

“Masyarakat terlibat dalam pekerjaan talud pengaman banjir. Dalam satu minggu mereka hadir selama Dua kali di tempat pembangunan talud. Mereka kerja secara gotong royong.; (05 Agustus 2016).”

Hasil musawara tersebut merujuk pada perencanaan program yang dilaksanakan dalam tahap- tahap musyawara, bahwa proses pelaksanaan talud pengaman banjir dilaksanakan oleh semua warga masyarakat. Masyarakat hadir dilokasi pembangunan talud pengaman banjir dan secara bergotong royong bekerja membuat talud. Bahan bahan bangunan seperti

batu, pasir semen serta yang lainnya ada yang didatangkan oleh Tim Pengelolah Kegiatan namun bahan bangunan seperti batu dan pasir ada yang didatangkan oleh masyarakat. Bahan bangunan yang dapat dijangkau oleh masyarakat seperti batu, pasir dapat didatangkan oleh masyarakat sendiri. Mereka bekerja bersama mendatangkan bahan- bahan tersebut. Selama dua hari dalam seminggu tersebut masyarakat bekerja secara bersama untuk membuat talud pengaman banjir. Pekerjaan dimulai bulan September yang mendekati musim hujan yang mana masyarakat (petani) bersiap untuk menanam. Kondisi ini akan menghambat proses kegiatan karena masyarakat disibuki dengan persiapan memasuki musim tanam apa lagi mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Bukit Seburi II adalah petani. Kontribusi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga, materi dan waktu. Hal ini merupakan bentuk- bentuk dari partisipasi masyarakat itu sendiri.

Di lain pihak menurut seorang informan lainnya yang bernama *Susi Lein* mengatakan bahwa :

“Selain tenaga laki- laki yang bekerja namun kaum perempuan juga terlibat dalam proses kegiatan. Ada sebagian yang terlibat langsung dalam pekerjaan talud namun sebagiannya menyiapkan makannya bagi warga yang bekerja. Kami perempuan juga sangat mendukung kegiatan pembangunan talud pengaman banjir ; (06 Agustus 2016).”

Hasil wawancara ini menunjukkan partisipasi gender dalam pembangunan. Keterlibatan kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatan merupakan sebuah titik positif akan respon kaum perempuan dalam setiap

program pemerintah. Keterlibatan pihak perempuan dalam pembuatan talud pengaman banjir sebagai bentuk dukungan secara partisipatif dalam pelaksanaan program.

Dalam kegiatan pembuatan talud pengaman banjir di Desa Bukit Seburi II, seluruh warga masyarakat terlibat. Sebagian hadir ditempat kegiatan untuk bekerja namun sebagiannya menyiapkan konsumsi. Mereka saling bekerja sama dan saling mendukung agar pekerjaan talud pengaman banjir dapat terselesaikan secara baik. Mereka mengangkat batu dan pasir. Masyarakat memberikan tenaga dan material untuk mendukung suksesnya program yang nota benanya masyarakat sendiri membangun desanya sendiri. Kesemuaan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ADD.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan program, keutuhan partisipasi yang diharapkan ternyata berbenturan dengan kondisi real yang dialami. Adanya penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Hal tersebut diakibatkan oleh timbulnya kecemburuan dari masyarakat bahwa adanya indikasi penempatan lokasi pembuatan talud pengaman banjir cenderung ke area milik aparat desa. Dengan munculnya kecemburuan social itu menurunkan semangat partisipasi sehingga menghambat proses pembuatan talud pengaman banjir tersebut. Menurut informan yang bernama *Gergorius Igo* menyatakan bahwa

“Penempatan lokasi pembangunan talud pengaman banjir sepertinya ada unsure kepentingan pemerintah desa. Talud dibangun terdahulu dekat rumah- rumah aarat desa. Kami sebagai

masyarakat merasa tidak puas sehingga dapat membuat kami jadi malas kerja; (07 Agustus 2016).”

Ini berarti semangat partisipasi masyarakat menurun yang berefek pada lambannya penyelesaian kegiatan pembuatan talud pengaman banjir. Kecemburuan social ini terjadi karena pada tahap perencanaan tidak dibicarakan menyangkut lokasi mana yang harus didahulukan. Ini berarti perencanaan tidak secara terperinci sehingga dapat mengabaikan hal-hal tertentu. Selain itu, menurut kepala Desa Bukit Seburu II sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut mengungkapkan bahwa manurunya semangat partisipasi masyarakat juga karena tumbunya sikap ego wilayah dikalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang wilayahnya sudah dilewati talud pengaman banjir membuat mereka malas untuk berpartisipasi dalam kegiatan serupa di lokasi berikutnya. Hal ini juga membuat proses pelaksanaan program semakin lamban.

Pada tahap pelaksanaan ini bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, material, waktu dan juga tidak menutup kemungkinan partisipasi dalam bentuk pikiran. Kesemua bentuk partisipasi ini dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan program pembuatan talud pengaman banjir. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program.

3. Tahap Pengawasan

Dalam proses pelaksanaan kegiatan program ADD dalam hal ini pembuatan talud pengaman banjir diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan menjalankan fungsi control agar proses kegiatan berjalan

secara baik. Informen ditemukan menggambarkan pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah desa, TPK dan juga masyarakat itu sendiri. Salah seorang informan yang bernama *Hendrikus Kopong Helan* menyatakan bahwa;

“Pengawasan terhadap proses kegiatan pembuatan talud pengaman banjir sangat penting. Pengawasan itu dilakukan oleh Pemerintah desa, TPK dan juga warga masyarakat itu sendiri. Selain itu juga dibuat tim pengawas yang dipilih dari masyarakat; (08 Agustus 2016).”

Pengawasan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah desa, TPK maupun masyarakat bertujuan untuk menjamin kelancaran pekerjaan, pengawasan tersebut lebih mengarah kepada pengawasan teknis agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan juga kualitas bangunan dapat terjamin pula.

Selain itu, informen yang bernama *Pius Paji* mempertegas dengan mengatakan bahwa

“Kami sebagai masyarakat juga selalu membuat pengawasan dalam proses kerja. Kami menginginkan agar fisik pekerjaan itu member hasil yang baik. Kami melakukan pengawasan dengan member usul saran; (08 Agustus 2016).”

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan program khususnya pada tahap pengawasan. Menurut temuan peneliti, pengawasan yang dilakukan peneliti hanya sebatas pada pengawasan proses pengerjaan talud. Pengawasan selebinya tidak menjadi tanggung jawab pengawas yang terbentuk dari kalangan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa

transparansi kegiatan program yang berkaitan dengan anggaran kegiatan tidak mencuat ke permukaan. Tim pengelolah kegiatan sendiri yang menngaturinya.

Dalam konteks kegiatan program, masyarakat sendiri melakukan pengawasan berarti masyarakat sendiri menjaga kualitas fisik dari program yang tengah dilaksanakan sehingga output dari program dapat member manfaat yang semaksimal mungkin bagi masyarakat itu sendiri.

Sementara di lain pihak menurut Tim pengawas *Bapak Pertus Doni Nuren* menyatakan bahwa

“Kami menjalankan tugas untuk menghimpun usul saran dari masyarakat dan selanjutya menyampaikan kepada TPK. Kami juga melakukan pengawasan secara langsung dalam pengerjaan talud; (09 Agustus 2016).”

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan program ADD di Desa Bukit Seburi II dilakukan oleh pemerintah desa baik oleh kepala desa bersama aparatnya maupun juga di lakukan oleh BPD. secara normatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program juga dadlah pemerintah desa. Selain itu juga tim pengwas bersama measyarakat pun melakukan pengawasan. Segala usul saran dari masyarakat dihimpun oleh tim pengawas dan selanjutnya dibawa ke TPK untuk memperhatikan berbagai hal yang harus dibenahi. Pengawsan yang dilakukan ini demi menjamin kelancaran kegiatan dan kualitas fisik bangunan. Disini menunjukkan model partisipasi berupa pikiran dan gagasan dari masyarakat.

4. Tahap Pemanfaatan

Setiap implementasi kebijakan public atau program pemerintah menjadib tolak ukur adalah out put kebijakan atau program tersebut. Puas atau tidakpuasnya masyarakat terhadap kebijakan atau program dapat diukur ketika kebijakan atau program itu memberi manfaat bagi masyarakat. Begitupun dalam inplementasi program ADD di Desa Bukit Seburi II.

Masyarakat desa bukit seburi II puas dan tdak puas terhadap program ADD ketika manfaat dari program tersebut dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat desa bukit Seburi II merasa puas dengan hasil kerja karena bagi mereka dengan keberadaan talud pengaman banjir dapat memberi rasa nyaman ketika misim hujan. Hal tersebut didukung oleh nformen yang ditemui. Seorang informen yang bernama *Bernadus Beda Soge* mengatakan bahwa

“Kami meras puas dengan hasil kerja kami. Kamisekarang maerasa aman pada saat musim hujan. Talud pengaman banjir sangat bermanfaat bagi kami; (10 Agustus 2016).”

Dalam tahap pemanfaatan ini termasuk didalamnya adalah perawatan. Demi perawatan terhadaap fisik bangunan alud pengaman banjir maka terbentuklah tim perawatan. Tim perawatan ini bertugas untuk mementau kondisi fisik bangunan demi menjaga kemungkinan terjadinya kerusakan pada fisik bagunan tersebut. Menurut anggota tim TPK yang bernama *Stanis Boli* mengatakan bahwa

“Perawatan terhadap talud pengaman banjir adalah kewajiban semua masyarakat. Masyarakat sendiri merawatnya. Tim perawat hanya memantau agar perawatannya lebih baik; (10 Agustus 2016).”

Pada tahap pemanfaatan program ini masyarakat merasakan hasil kerjanya sendiri, masyarakat merasa puas dengan apa yang direncanakan, dikerjakan dalam tahap pelaksanaan serta pengawasan yang dilakukan hingga bermuara pada pemanfaatan hasil kerja itu. Manfaat yang dialami berkat adanya partisipasi secara universal.

Namun dalam pengamatan peneliti, di dusun 4 sekitar 10 meter badan talud runtuh. Kondisi talud yang runtuh ini belum diperbaiki, menurut Tim perawat talud yang runtuh belum bias diperbaiki karena ketiadaan dana. Disini dapat dikatakan bahwa Tim perawat belum maksimal bekerja secara serius dalam melakukan perawatan. ketika ditemui dan diwawancarai, *Bapak Bernadus Gesak* selaku ketua tim Perawat mengatakan bahwa

“Sejak tim perawat terbentuk, Tim perawat tidak memiliki dana, Tim perawat hanya memnatau kondidi bangunan fisik dan melaporkan kepada pemerintah Desa. Tim perawat Hanya memotivasi masyarakat untuk menjaga bangunan yang telah dibangun; (10Agustus 2016).”

Tim perawat yang terbentuk memiliki tugas perawatan terhadap bangunan yang telah dikerjakan namun tidak memiliki pos dana dari program tersebut. Ketika menumui TPK juga menjelaskan hal yang sama bahwa tim perawat yang terbentuk memiliki porsi dana dari program sebagai dana perawatan. Ini berarti bahwa Tim perawat berkordinasi

dengan pemerintah desa. Sementara itu juga, menurut kepala Desa bahwa perawatan terhadap fisik bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Dengan demikian, tanggung jawab sepenuhnya atas pelestarian fisik bangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa. Tim perawat hanya berkordinasi dengan pemerintah desa dalam proses perawatan bila terjadi kerusakan sedangkan selebnya Tim perawat hanya memotivasi untuk melestarikan bangunan tersebut.

5. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai kegiatan atau tindakan untuk menilai suatu kinerja atau kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk melihat semua kekurangan atau kelebihan dari suatu kegiatan yang tengah dijalani agar dapat menata secara baik kegiatan tersebut. Begitupun dengan evaluasi kebijakan untuk melihat suatu kebijakan yang tengah atau sudah diimplementasikan agar memperoleh umpan balik dalam proses kebijakan selanjutnya. Evaluasi biasanya dilakukan baik dalam evaluasi awal, evaluasi proses maupun evaluasi akhir.

Dalam implementasi program ADD di Desa Bukit Sebur II, evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi proses dalam implementasi program ADD di Desa Bukit Sebur II berarti evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat ketika talud pengaman banjir masih dalam proses pelaksanaan. Bila adanya hal-hal sebagai kekurangan dicari jalan keluarnya dan yang dianggap sudah pas

dilanjutkan dan dipertahankan. Sementara evaluasi akhir adalah masyarakat menilai semua tahapan atau yang dilakukan baik dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, tahap pemanfaatan hingga tahap evaluasi itu sendiri. Evaluasi akhir merupakan evaluasi keseluruhan tahapan program. Menurut sebagian besar informan ditemui bahwa evaluasi proses dijalankan secara baik namun evaluasi akhir masyarakat tidak terlibat secara utuh. Salah seorang informan yang bernama *Marius Basa* mengatakan bahwa

“Kami melakukan evaluasi biasa setiap hari pada saat kami kerja. Sehabis kerja kami selalu evaluasi kegiatan pada hari itu sehingga kami tahu kekeurangan dan kemajuan yang kami alami hari itu. Evaluasi biasa dipimpin oleh Tim Pengelola kegiatan (TPK). Tapi evaluasi akhir, masyarakat tidak dilibatkan secara keseluruhan hanya utusan- utusan dari setiap wilayah dusun; (11 Agustus 2016).”

Evaluasi proses dilakukan setiap kali kegiatan pekerjaan talud pengaman banjir dilaksanakan. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada sore hari sesudah kegiatan seharian dilakukan. Evaluasi ini bertujuan agar masyarakat mampu menilai seberapa besar hal- hal yang masih kurang dan seberapa besar hal- hal positif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan seharian itu. Disini masyarakat sendiri dapat mencari jalan keluar dari kekurangan tersebut agar dapat mengarah kepada kebaikan bersama. Sementara berkaitan dengan evaluasi akhir yang tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh hanya utusan- utusan masyarakat yang mewakili masyarakat lainnya, di jawab oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan pemerintah desa dalam hal ini kepala desa

dengan jawaban serupa yaitu karena waktu kepepet terdesak oleh kegiatan desa lainnya. Karena kesibukan di desa baik urusan desa lainnya dan juga kesibukan masyarakat sehingga diambil jalan pintas, evaluasi dihadiri oleh keterwakilan dari masyarakat. Di sini dapat dikatakan bahwa evaluasi akhir tidak melibatkan masyarakat secara menyeluruh, itu berarti partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi belum maksimal. Yang seharusnya masyarakat secara bebas berpartisipasi dalam bentuk ide dan gagasan untuk menilai kinerja program. Ini merupakan kelumpuhan dalam partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi. Hal ini dapat dilihat sebagai faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat.

Terhadap kondisi ini sebagian besar masyarakat sangat menyesalkan, sekian informan yang ditemui menuturkan hal yang sama akan ketidakpuasan terhadap evaluasi akhir yang tidak melibatkan masyarakat tersebut. Menurut informan yang bernama *Antonius Siku* mengatakan bahwa

“Dengan tidak menghadirkan masyarakat dalam evaluasi akhir ini membuat masyarakat untuk enggan berpartisipasi. Masyarakat akan malas untuk terlibat dalam kegiatan lain yang serupa membutuhkan partisipasi; (11 Agustus 2016).”

Evaluasi akhir yang tidak menghadirkan masyarakat ini, mengebiri semangat partisipasi masyarakat. Semangat partisipasi yang sebenarnya baru mulai dibangun akhirnya mulai layu kembali. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi pemerintah desa dalam menggalang partisipasi masyarakat. Evaluasi terakhir yang tidak menghadirkan masyarakat secara menyeluruh ini dapat member persepsi negative dikalangan masyarakat yang

berindikasi pada ketidak beresan administrasi program. Hal ini seharusnya perlu dihadiri sehingga tidak memunculkan kecemburuan social yang dapat mematikan semangat partisipasi masyarakat.

2. Deskripsi Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur.

Di setiap proses pelaksanaan kebijakan selalu ada ditemukan faktor- faktor yang mempengaruhi. Dalam pelaksanaan program ADD di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur pun tak luput dari faktor tersebut. Menurut informen- informen yang diketemui bahwa dalam pelaksanaan program tak luput dari hambatan- hambatan. Seorang informen yang bernama *Ignasius Raya Lein* dalam wawancara menyatakan Bahwa

”Program ADD yang diturunkan memiliki aturan masing- masing, aturan yang ada berbenturan atau bertolak belakang dengan kondisi masyarakat setempat. Misalnya waktu pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu kurang lebih tiga bulan, namun molor karena harus berhenti kerja kalau ada musibah kematian di desa karena kebiasaan di desa semua kegiatan umum harus dihentikan kurang lebih satu bulan. Selain itu, pelaksanaan program pada musim tanam, maka masyarakat juga harus sibuk dengan lahannya masing- masing sehingga menghambat proses pekerjaan; (11 Agustus 2016).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa aturan normatif program berbenturan dengan kondisi masyarakat. Kegiatan program yang seharusnya diselesaikan secara tepat namun karena kondisi sosial budaya dan ekonomi membuat proses pelaksanaan kegiatan terkatung- katung.

Sementara di lain pihak, oleh bapak *Elias Beda Lein* dalam wawancara mempertegas dengan menyatakan bahwa

”Masyarakat sekarang ini kaget dan bingung terhadap program karena selama ini pembangunan fisik biasanya dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat hanya terima hasilnya. Sehingga bisa membuat masyarakat untuk tidak semangat untuk bekerja bahkan menimbulkan kemalasan dalam diri masyarakat; (11 Agustus 2016).”

Perubahan paradigma pembangunan yang menekankan pola pendekatan partisipatif merupakan pola baru yang mana masyarakat melihatnya sebagai hal baru karena masyarakat telah dibiasakan dengan pola proyek yang mana masyarakat adalah target dari program yang menada manfaat program tanpa terlibat dalam proses kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang dilakukan oleh peneliti yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program ADD di Desa Bukit Sehuri II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, menemukan ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat diantaranya adalah :

1. Hambatan Sosial Budaya

Aturan normatif program yang tertuang dalam junlak dan juknis berbenturan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pelaksanaan program ADD dengan kegiatan pembuatan talud pengaman banjir dihentikan sementara waktu jika terjadi musibah kematian di desa. Kebiasaan di desa tersebut jika terjadi musibah kematian maka desa tersebut berduka kurang lebih satu bulan. Hal ini dapat menekankan laju pembangunan desa.

2. Hambatan Sosial Ekonomi

Pelaksanaan kegiatan program pada bulan september sangat dipengaruhi oleh mata pencaharian petani yang bersiap memasuki musim tanam. Dengan kesibukan petani mengurangi keterlibatan masyarakat dalam kegiatan program.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam melaksanakan pembangunan desa, butuh partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat untuk menunjang segala bentuk kegiatan, seperti halnya dengan pembangunan di Desa Bukit Seburi II. Pembangunan ini merupakan satu tuntas seluruh elemen masyarakat akan pentingnya sebuah perubahan. Maka dengan hadirnya dana ADD pemerintah dan masyarakat menyambut baik program ini. ADD yang bergulir pada tahun 2016 di Desa Bukit Seburi II diperuntukan untuk Pembangunan Infrastruktur Desa, dan menjadi opsi pilihan

adalah pembangunan talud pengaman banjir, kegiatan ini membutuhkan beberapa tahapan diantaranya adalah tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan tahap pemanfaatan dan tahap evaluasi.

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran, pendapat dan gagasan sangat diperlukan. Pada tahap perencanaan dimulai dengan musyawara- muusyawara dilakukan sebanyak dua hari. Hari pertama dilakukan dengan musyawara penggalian gagasan dan penetapan prioritas sedangkan hari kedua dilaksanakan musyawara pendanaan dan musyawara pelaksanaan. Masyarakat terlibat dan memberikan ide dan gagsan dalam tahap ini. Tahap perencanaan merupakan tahap untuk menentukan apa yang harus dilakukan. Masyarakat sendiri mmenyepakati dan pada akhirnya pula masyarakatlah yang melaksanakannya.maka bisa dikatakan bawah partisipasi masyarkat merupakan pentuh akan sebuah keberhasilan pembangunan di Desa Bukit Seburi II.

Senadah Dengan Itu Moresta Masda Bara Baro (2010) dalam Penelitian tentang “pelaksanaan program ADD pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Panjang Kota kupang”, manemukan bahwa Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga dalam pelaksanaan program ADD pembangunan jalan di RT 05 RW 02 kelurahan pasir panjang dapat dikategorikan tidak semua dapat

berpartisipasi dengan baik karena tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan jalan tersebut.

Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80, UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - 3) pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- 5) peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

Ada perbedaan pandangan dalam tahap perencanaan antara penelitian sebelumnya yang mengungkapkan adanya sikap apatis dari masyarakat, kondisi ini harus menjadi perhatian yang serius dari pemerintah desa setempat. Maka prinsip transparansi yang termaktub dalam UU harus menjadi acuan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan desa secara Khusus.

Konsep perencanaan ini akhirnya memposisikan masyarakat dan partisipasi sebagai penentu keberhasilan pembangunan. hal ini diperkuat dengan teori Partisipasi menurut Isbandi (2007: 27) adalah : keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk mengani solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini bentuk partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam bentuk tenaga, material, waktu dan juga tidak menutup kemungkinan partisipasi dalam bentuk pikiran. Kesemua bentuk partisipasi ini dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan program pembuatan talud pengaman banjir. Partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan program.

pelaksanaan alokasi dana desa yang merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang telah disepakati. Alokasi dana desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah yang diserahkan pada masing-masing-masing pos dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada tim pelaksana tingkat desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.

Sementara itu, Severinus E. Kusuma (2005) dalam melakukan studi tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan proyek pembangunan sanitasi air minum di desa Bolo Worok kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai Menyatakan bahwa : Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dalam bentuk tenaga, baik gotong royong maupun secara pribadi terlibat aktif dalam melaksanakan program tersebut.

Tahap pelaksanaan program intinya menunjuk pada perubahan proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah. Penerapan kebijakan atau pemberian pelayanan merupakan tujuan, sedangkan operasi atau kegiatan-kegiatan untuk mencapainya adalah alat pencapaian tujuan (Suharto, 2010: 79).

Berdasarkan konsep pelaksanaan di atas, tahap pelaksanaan ini adalah proses melaksanakan program-program maupun keputusan-keputusan, baik berupa keputusan dari atas maupun keputusan yang diambil bersama guna dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan. Maka dapat ditegaskan bahwa tahap pelaksanaan ADD pada

kegiatan pencairan dan penyaluran ADD secara bertahap dan selanjutnya pelaksanaan program-program kegiatan yang didanai oleh ADD tersebut. Sejalan dengan hal tersebut dalam Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 dan 22 dijelaskan tentang tahap pelaksanaan ini, mulai dari pencairan dan penyaluran serta pelaksanaan kegiatan secara rinci.

3. Tahap Pengawasan

Pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan program ADD di Desa Bukit Seburi II dilakukan oleh pemerintah desa baik oleh kepala desa bersama aparatnya maupun juga dilakukan oleh BPD. secara normatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program juga adalah pemerintah desa. Selain itu juga tim pengawas bersama masyarakat pun melakukan pengawasan. Segala usul saran dari masyarakat dihimpun oleh tim pengawas dan selanjutnya dibawa ke TPK untuk memperhatikan berbagai hal yang harus dibenahi. Pengawasan yang dilakukan ini demi menjamin kelancaran kegiatan dan kualitas fisik bangunan. Disini menunjukkan model partisipasi berupa pikiran dan gagasan dari masyarakat.

Sementara Itu Moresta Masda Bara Baro (2010) dalam Penelitian tentang “pelaksanaan program ADD pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang”, menemukan bahwa Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program

kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Sejalan dengan Suharto (2010: 118) *monitoring* atau pengawasan adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Menurut Suharto (2010: 118) tujuan pengawasan meliputi:

- a. Mengetahui bagaimana masukan (input) sumber-sumber dalam rencana digunakan
- b. Bagaimana kegiatan-kegiatan dalam implementasi digunakan
- c. Apakah rentang waktu implementasi terpenuhi secara tepat atau tidak
- d. Apakah setiap saat aspek dalam perencanaan dan implementasi berjalan dengan yang diharapkan

Dengan demikian monitoring atau pengawasan adalah mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Berdasarkan pernyataan di atas pengawasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan dilakukan untuk pengendalian yang efektif. bisa saja terjadi penyimpangan dari rencana yang ada. Pengawasan dalam konteks ini yaitu pengawasan pengelolaan ADD pada Desa Bukit Seburi II dilakukan TPK.

4. Tahap Pemanfaatan

Pemanfaatan terhadap program ADD di desa Bukit Seburi II di tandai dengan adanya Tim Perawat, Tim perawat yang terbentuk memiliki tugas perawatan terhadap bangunan yang telah dikerjakan namun tidak memiliki pos dana dari program tersebut. Ketika menumui TPK juga menjelaskan hal yang sama bahwa tim perawat yang terbentuk memiliki porsi dana dari program sebagai dana perawatan. Ini berarti bahwa Tim perawat berkordinasi dengan pemerintah desa. Sementara itu juga, menurut kepala Desa bahwa perawatan terhadap fisik bangunan menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Dengan demikian, tanggung jawab sepenuhnya atas pelestarian fisik bangunan adalah tanggung jawab pemerintah desa. Tim perawat hanya berkordinasi dengan pemerintah desa dalam proses perawatan bila terjadi kerusakan sedangkan selebinya Tim perawat hanya memotivasi untuk melestarikan mengawasi seluruh bangunan tersebut.

Sementara itu Susanti (2014) dalam Penelitian tentang “pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di desa kayungo kecamatan long ikis kabupaten paser”, menemukan bahwa Secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) baik dalam pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara langsung dan tidak langsung.

Pengawasan menurut Siagian (2004:125) adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa

semua kegiatan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

ini menunjukkan bahwa Desa Bukit Seburi II mampu menjaga segala bentuk pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga kepuasan akan hasil kerja dirasakan efeknya. Oleh karena itu kerjasama dari seluruh stekholder dan masyarakat.

5. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi di Desa Bukit Seburi II dilakukan setiap kali kegiatan pekerjaan talud pengaman banjir dilaksanakan. Evaluasi ini biasanya dilakukan pada sore hari sesudah kegiatan saharian dilakukan. Evaluasi ini bertujuan agar masyarakat mampu menilai seberapa besar hal-hal yang masih kurang dan seberapa besar hal-hal positif yang dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan saharian itu. Disini masyarakat sendiri dapat mencari jalan keluar dari kekurangan tersebut agar dapat mengarah kepada kebaikan bersama.

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi

ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N Dunn : 2000).

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (output). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Pandangan ini mampu mempossisikan Desa Bukit Seburi II Sebagai desa teladan yang menjalankan seluruh tahapan, dari proses sampai hasil berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan secara yuridis konstitusional sehingga keberhasilan pembangunan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun beberapa hal yang disimpulkan berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang dilakukan berkaitan dengan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur adalah Sebagai Berikut :

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa

- a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan cukup baik karena masyarakat terlibat dalam setiap tahapan musyawara dalam tahap perencanaan. Dalam hal ini masyarakat sendiri menyepakati bidang kerja talud pengaman banjir dalam rangka pengembangan infrastruktur di desa yang bermanfaat bagi masyarakat sendiri.
- b. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat berjalan terus baik partisipasi dalam bentuk ide dan gagasan maupun tenaga serta material namun diwarnai dengan kecemburuan social karena ketidakpuasan masyarakat dengan lokasi pembuatan talud pengaman banjir yang didahulukan dekat lokasi para pejabat desa sehingga dapat menurunkan derajat semangat partisipasi itu sendiri.
- c. Pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide sangat baik dan bahkan dari kalangan masyarakat itu sendiri

terbentuklah tim pengawas yang mengawasi proses pekerjaan talud pengaman banjir.

- d. Masyarakat puas dengan hasil kerjanya sendiri karena manfaat talud pengaman banjir dapat member rasa aman bagi mereka pada musim hujan. Tetapi ditenga pemanfaatan masih kurangnya kesadaran pelestarian karena talud yang runtuh di dusun 4 RT 13 belum diperbaiki. Tim perawat yang dibentuk dari kalangan masyarakat pun belum bekerja secara maksimal.
- e. Pada tahap evaluasi, yang mana evaluasi proses dilakukan secara baik dalam setiap proses pekerjaan sedangkan evaluasi akhir dari keseluruhan program masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh tetapi keterlibatan mastayarakat secara keterwakilan. Karena itu dapat dikatakan proses evaluasi kegiatan program tidak berjalan secara maksimal.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

- a. Budaya merupakan sebuah kebiasaan yang yang sulit untuk dihilangkan seperti halnya dengan budaya kematian di Desa Bikit Seburi II,seluruh Kegiatan Desa dihentikan paling kurang satu bulan. Itu dapat mempegaruhi laju pertumbuhan pembangunan desa.
- b. Ekonomi masyarakat Desa tersendat dengan program Pemerintah Desa yang melangsungkan kegiatan pembangunan Talud di bulan September,karna bulan September itu musim tanam.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian adalah dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam menggalang partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Dalam setiap pembangunan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, masyarakat harus dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap tahap perencanaan. Dan pada tahap ini perlu adanya motivasi akan pentingnya partisipasi masyarakat. Selain itu juga perlu diupayakan dengan kegiatan- kegiatan lain di desa dengan pendekatan partisipatif.
2. Dalam setiap perencanaan yang ditempuh perlu dilakukan perencanaan secara merinci. Artinya bahwa segala apa yang dilakukan perlu dibahas secara bersama karena bila hal- hal yang terlupakan dan diambil langka melalui kebijakan sehingga bias menimbulkan kecemburuan social.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan program perlu adanya transparansi baik dari pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya sehingga tidak menimbulkan kecemburuan social yang dapat menghambat proses kegiatan. Tindakan transparansi ini ditandai dengan pertanggungjawaban secara terperinci dan menyeluruh kepada masyarakat serta masyarakat perlu memberikan usul saran dan kritikan dalam rangka penataan kegiatan yang sedang berlangsung.

4. Setiap bangunan fisik yang telah ada, pemerintah perlu mengkoordinasi masyarakat agar dapat melakukan tindakan pemeliharaan secara baik. Masyarakat digerakan dengan tindakan- tindakan praktis, misalnya adanya praturan desatentang pelestarian fisik bangunan di desa sehingga mengikat semua masyarakat untuk menjaga kelestarian hasil- hasil program tersebut.
5. Kegiatan evaluasi harus dilibatkan segenap warga masyarakat sehingga dengan mudah menilai berbagai kekurangan dan kelebihan yang dialami. Segala apa yang positif dipertahankan sedangkan yang masih mengalami kekurangan dicarikan jalan keluarnya secara bersama pula. Dalam tataran evaluasi ini yang seharusnya perlu didengarkan adalah masyarakat karena merekalah yang melaksanakan semuanya dalam bentuk partisipasi.
6. Saatnya masyarakat harus menyadari bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab masyarakat desa.pendekatan partisipatif sangat membantu upaya pembangunan desa. Karena itu masyarakat seharusnya menumbukan kembali semangat kebiasaan gotong royong di desa sebagai cikal bakal pendekatan partisipasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara lansung*, Jakarta: PT raja grafindo persada.Aksara.
- Abidin,Zainal, Said, 2008. *Strategi kebijakan dalam pembangunan dan Ekonomi Politik, Jakarta* : Suara Bebas
- Adi,Rukminto,Isbandi,2008. *Intervensi Komuntas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta*: Rajawali Pers
- Ali, Madekhan, 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*, Averroes Press, Yogyakarta
- Coyers, Diana, 1991. *Perencanaan Sosial Di Dunia Ketiga*, Yogyakarta : UGM Press.
- Cristenso, 1989. *Administrasi Publik*, Bandung: CV.Alfabeta
- Frediman, 1992. *Pembangunan Alternatif*. Bandung : Mandar maju
- Hakim. Lukman EM.2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Ar-Ruzz Media.
- Holil, Soelaiman, 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Isbandi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok : FISIP UI Press.
- Isbandi, Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas:Dari pemikiran Menuju Penerapan*.Depok : FISIP UI Press
- Islamy, Irfan. 1984. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.Jakarta : Bumi Aksara.
- Kumoroto, Wahyudi,2005, *Etika Administrasi*, Jakarta; Bumi Aksara
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Rupa
- Lubis, Solly. 2007. *Kebijakan Publik*. Bandung : Mandar Maju.

- Mardikanto, Tatok. 1994. *Redefinisi penyuluhan Partisipatif*. Jakarta : Puspa.
- Mikkelsen, 1999, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya- Upaya Pemberdayaan : Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moekijat. 1995. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju
- Moleong, Lexy J, 2001. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya. Oxford English Decteonari
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung :Alfabeta
- Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan serta petunjuk teknis Alokasi Dana Desa. Tahun 2007.
- Prijono, Y.M. & Tjiptoherijanto, P. (1983). *Demokrasi Di Pedesaan Jawa*. Penerbit Sinar Harapan dan Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi – UI. Jakarta
- Subarsono AG. 2005. *Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyoy, A. Linda, 201. *Identifikasi Potensi Korupsi pada Keuangan Desa*, makalah disampaikan ke KPK
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono, 2006, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Bandung: CV. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2006. *Kebijakan Sosial*, Makalah Seminar. Bandung
- Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu: Yogyakarta
- Sutrisno, 2005. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung ; PT Remaj
- Widjaja, H.A.W. (2003). *Otonomi Desa – Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

UNDANG- UNDANG

UU No 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah

UU No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa

SKRIPSI

Baro, Moresta Masda Bara. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program ADD Pembangunan Jalan Lingkungan di RT 05 RW 02 Kelurahan pasir panjang Kota Kupang*. **Skripsi**. Kupang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik- Universitas Nusa Cendana.

Kusuma, Severinus E. 2005. *Studi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Proyek pembangunan sanitasi air Minum di Desa Bolo worok kecamatan Ruteng kabupaten Manggarai*. **Skripsi**. Kupang : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik- Universitas Nusa Cendana.

Susanti. 2014. *Pengawasan badan permusyawaratan desa (BPD) Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) Di desa kayungo kecamatan long ikis Kabupaten paser* **Skripsi**. : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik- Universitas Mulwarman.

INTERNET

[Http ://sacafirmansyah. Wordpress. Com/2009/partisipasi masyarakat](http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/partisipasi-masyarakat) diakses pada tanggal 17 september 2016

[Http://ivanaffriani. Wordpress. Com/2009/metode penelitian kualitatif](http://ivanaffriani.wordpress.com/2009/metode-penelitian-kualitatif) diakses pada tanggal 17september 2016

PEDOMAN WAWANCARA

**JUDUL : PEMENFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUKIT
SEBURI II KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN
FLORES TIMUR**

Aspek- Aspek Penelitian

1. Tahap Perencanaan

- a. Apa anda ikut dalam perencanaan program ADD ?
- b. Kapan dilaksanakan program itu ?
- c. Bagaiman respon masyarakt terhadap kehadiran program ADD ?
- d. Bagaiman Kehadiran Masyarakat desa pada saat perencanaan program ADD ?
- e. Apa saja yang dibahas dalam perencanaan program ADD ?
- f. Berapa Besar dana Program ADD untuk Desa Bukit Seburi II Tahun Ini ?
- g. Dalam Pengembangan Infrastruktur Bidang Kerja yang dipilih adalah pembuatan talud pengaman banjir. Mengapa pembuatan talud pengaman banjir yang dipilih ?
- h. Dimana saja lokasi pembangunan talud pengaman banjir ?

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sejak kapan dimulai pekerjaan pembuatan talud pengaman banjir ?
- b. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembuatan talud pengaman banjir ?
- c. Bahwa pada saat pekerjaan talud pengaman banjir banyak masyarakat malas datang dilokasi pembuatan talud pengaman banjir. Apa alasan mengapa mereka tidak hadir ?
- d. Bagaimana cara mendatangkan bahan- bahan bangunan dilokasi pembuatan talud pengaman banjir ?
- e. Bagaimana masyarakat bekerja membuat talud pengaman banjir ?

3. Tahap pengawasan

- a. Bagaimana masyarakat sendiri mengawasi proses pelaksanaan kegiatan pembuatan talud pengaman banjir ?
- b. Bentuk- bentuk pengawasan yang dilakukan seperti apa saja ?
- c. Apakah pengawas dari pihak lain selain masyarakat seperti kepala desa, kepala dusun, Tim pengelolah Kegiatan dan BPD ?
- d. Bagaimana mereka mengawasi Kegiatan tersebut ?

4. Tahap Pemanfaatan

- a. Setelah pelaksanaan kegiatan pembuatan talud pengaman banjir, bagaimana respon anda terhadap hasil kerja tersebut ?
- b. Apakah anda puas dengan hasil kerja dengan pengorbanan anda selama proses kerja ?
- c. Apa manfaat talud pengaman banjir bagi masyarakat ?

- d. Dalam tahap pemanfaatan termasuk didalamnya ada pelestarian terhadap hasil kerja. Apa saja yang dilakukan sebagai bentuk pelestarian ?

5. Tahap Evaluasi

- a. Apakah anda terlibat dalam proses Evaluasi ?
- b. Kapan dilaksanakan proses evaluasi ?
- c. Bagaimana kehadiran masyarakat dan respon masyarakat dalam proses Evaluasi ?
- d. Apa saja bentuk- bentuk evaluasi yang dilakukan ?
- e. Apakah kekurangan- kekurangan yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut ?
- f. Apakah kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari proram ADD ?
- g. Apakah ada hal-hal yang menghambat Proses Kegiatan tersebut ?

Riwayat Hidup



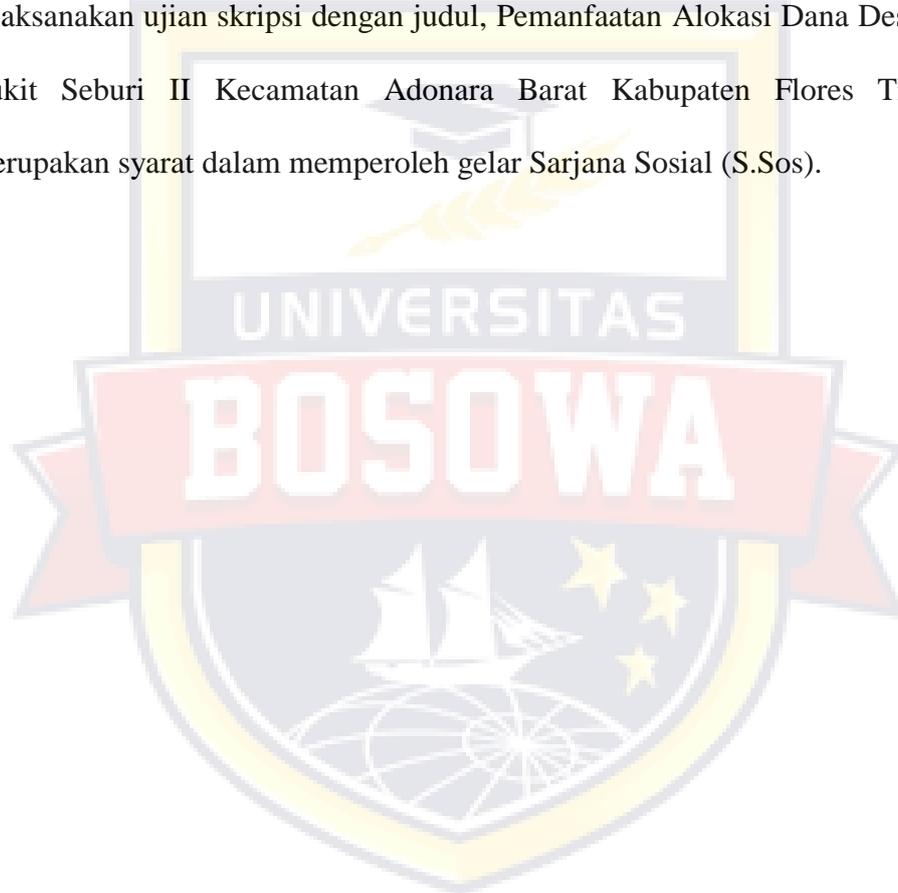
Agustinus Geben Lein, anak kelima dari Lima bersaudara buah cinta dari pernikahan Ayahanda Bernadus Bayo (Alm) dan Ibunda Yuliana Bulu.

Lahir pada tanggal 17 Agustus 1988 di desa Bukit Seburi, Kabupaten Flores Timur, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh penulis mulai dari Sekolah Dasar Katolik Leter dan menamatkannya pada tahun 2002, lanjut ke Sekolah Menengah Pertama Swasta Katolik Lemba Seburi dan selesai pada tahun 2004.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas pada SMA Negeri 1 Adonara Barat dan menamatkannya pada tahun 2008. Setelah menyelesaikan studi pada jenjang SD, SLTP, SMA, penulis berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan memilih Sulawesi Selatan/Makassar sebagai tempat melanjutkan studi dan mendaftar pada Perguruan Tinggi Swasta dan tepatnya pada Universitas “45” Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dengan Jurusan Administrasi Negara dan diterima sebagai Mahasiswa pada Universitas “45” Makassar pada tahun 2010. Selama pendidikan, Penulis dalam menjalankan proses akademik di Jurusan Administrasi Negara Universitas 45 Makassar. Penulis berkecimpung di dunia kelembagaan kemahasiswaan baik intra maupun ekstra kampus, dan bergabung pada PIMEN (Perhimpunan Mahasiswa Adminitrasi Negara) tahun 2010, LMND (Liga Mahasiswa Nasional Untuk

Demokrasi) tahun 2010, dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) tahun 2014.

Untuk menyelesaikan studi harus melalui proses penelitian dan skripsi sebagai salah satu prasyarat dalam menyelesaikan studi. Akhir dari semua proses dan syarat untuk menyelesaikan studi berakhir pada hari /tgl/bln/thn dengan dilaksanakan ujian skripsi dengan judul, Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).





UNIVERSITAS BOSOWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 1, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>, Email: fisip@universitasbosowa.ac.id

Nomor : A.229/FSP/UNIBOS/VI/2016
Lampiran : 1 (Satu) rangkap Proposal Skripsi
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

Kepada Yth.
Kesbangpol Kabupaten Flores Timur

Di-

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan hormat,

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/ Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : AGUSTINUS GEBEN LEIN
NIM : 45 10 021 041
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bukit Seburi II
Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur .
Tempat : Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat
Waktu : Juni – Juli 2016

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir / Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 23 Juni 2016

Dekan Fisipol Bosowa,

Arief Wicaksono, S.Ip, M.A.
Nidn : 09271107602

Tembusan :
1. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
WAIWADAN**

SURAT KETERANGAN/ REKOMENDASI
Nomor: AB.070/ ~~561~~ /KESSYAN/2016

Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :BKBP.070/204/Sekret/2016 Tanggal 25 Juli 2016,
Perihal : Mengadakan Penelitian.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Menerangkan
Nama :TIDAK BERKEBERATAN.....
: **AGUSTINUS GEBEN LEIN**
NIM : 45 10 021 041
Pekerjaan : Mahasiswa
Untuk : Melakukan Penelitian
Judul : **“ PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BUKIT SEBURI II
KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR**

Lokasi Penelitian : Desa Bukit Seburi II - Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur
Lama Penelitian : 2 (Dua) Minggu

DENGAN KETENTUAN :

1. Wajib melaporkan maksud dan tujuan Penelitian kepada Pemerintah setempat.
2. Selama mengadakan Penelitian tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan di bidang lain.
3. Berbuat positif, tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat.
4. Wajib melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Flores Timur.
5. Rekomendasi ini akan batal, apabila pemegangnya tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya dan minta agar INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA yang dihubungi dapat memberikan bantuan/fasilitas kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

25 Juli 2016
PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
HENDRIKUS BERA KOTEN, SH
Pembina
NIP. 19680516 199903 1 002

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka.
2. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Flores Timur di Larantuka.
3. Dekan FISIPOL Universitas Bosowa di Makassar



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II

SURAT KETERANGAN/REKOMONDASI

NOMOR : BS II 005/42../Sekret/2016

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : Dominikus Sanga Nuba
Jabatan : Kepala Desa Bukit Seburi II
Alamat : Desa Bukit Seburi II - Kecamatan Adonara Barat-Kabupaten Flores Timur

Dengan Ini Mengijinkan Saudara :

Nama : Agustinus Geben Lein
NIM : 4510021041
Fakultas : FISIP
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : Universitas Bosowa – Makassar

Dengan Surat Penelitian Nomor : A. 229 / FSP/ UNIBOS/ VI / 2016, Tanggal 23 Juni. Bahwa Benar Saudara Yang namanya Tersebut Di atas Telah Diiijinkan Untuk Melakukan Penelitan Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, Dengan Judul Penelitian : “ **PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUKIT SEBURI II KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR** “ Selama 2 (Dua) Minggu

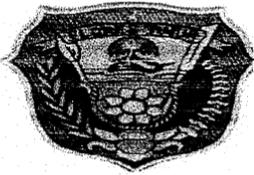
Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Dengan Sebenar- Benarnya Dan Selanjutnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Bukit Seburi II, 01 Agustus 2016

Kepala Desa Bukit Seburi II



DOMINIKUS SANGA NUBA



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
DESA BUKIT SEBURI II

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : BS II 005/46../Sekret/2016

Yang Bertandatangan di Bawah ini :

Nama : Dominikus Sanga Nuba
Jabatan : Kepala Desa Bukit Seburi II
Alamat : Desa Bukit Seburi II - Kecamatan Adonara Barat-Kabupaten Flores Timur

Dengan Ini Mengizinkan Saudara :

Nama : Agustinus Geben Lein
NIM : 4510021041
Fakultas : FISIP
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : Universitas Bosowa – Makassar

Dengan Surat Penelitian Nomor : A. 229 / FSP/ UNIBOS/ VI / 2016, Tanggal 23 Juni. Bahwa Benar Saudara Yang namanya Tersebut Di atas Telah Melakukan Penelitian Di Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat Kabupaten Flores Timur, Dengan Judul Penelitian : “**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DI DESA BUKIT SEBURI II KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR**” Selama 2 (Dua) Minggu

Demikian Surat Keterangan Ini Kami Buat Dengan Sebenar- Benarnya Dan Selanjutnya Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Bukit Seburi II, 24 Agustus 2016

Kepala Desa Bukit Seburi II

DOMINIKUS SANGA NUBA

TEMBUSAN

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di Makassar
2. Camat Adonara Barat Di- Waiwadan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA BARAT
WAIWADAN

Jln Trans Waiwadan – Buser, No Telepon : faX

SURAT KETERANGAN REKOMENDASI

Nomor: AB.070/765/SEKRET/2016

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini PLT. CAMAT ADONARA BARAT

Nama : HENDRIKUS BERA KOTEN
Nip : 19680516 199903 1002
Jabatan : CAMAT ADONARA BARAT
Alamat : Waiwadan – Kecamatan Adonar Barat

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : Agustinus Geben Lein
Nim : 4510021041
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : S.1
Lokasi Penelitian : Desa Bukit Seburi II Kecamatan Adonara Barat
Lama Penelitian : 2 (Dua) minggu

Adalah Benar- benar mahasiswa yang telah selesai mengadakan Penelitian Di Desa Bukit Seburi II, Kecamatan Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur Sesuai Dengan Surat Keterangan Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Bukit Seburi II Nomor : BS II. 070/ 46/ SEKRET/ 2016, tanggal 24 Agustus 2016

Demikian Surat Keterangan/Rekomendasi ini Kami Buat Untuk Dipergunakan Sebagaiman Mestinya.

20 Agustus 2016
Plt. Camat Adonara Barat
KECAMATAN
ADONARA BARAT
HENDRIKUS BERA KOTEN, SH
Pembina
Nip. 19680516 199903 1002

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univ. Bosowa Di makassar



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Ile Nepo Telp. (0383) 21014, Fax (0383) 21994
L A R A N T U K A - 86218

SURAT KETERANGAN

NOMOR : BKBP. 070 / 189 / Sekret / 2016

Membaca : Surat Camat Adonara Barat, Nomor: AB. 070/765/SEKRET/2016 Tanggal: 30 Agustus 2016 Perihal; Surat Keterangan Selesai Penelitian.

Memperhatikan : Surat Keterangan / Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Flores Timur Nomor : BKBP.070/204/Sekret/2016, Tanggal; 25 Juli 2016.

Menerangkan :

N a m a : **AGUSTINUS GEBEN LEIN**

No. Mahasiswa : 4510021041

Pekerjaan : **Mahasiswa.**

1. Telah selesai mengadakan Penelitian di Kecamatan Adonara Barat Pemerintah Kabupaten Flores Timur, dengan Judul : "PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BUKIT SEBURI II KECAMATAN ADONARA BARAT KABUPATEN FLORES TIMUR".
2. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Larantuka, 30 Agustus 2016

 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Flores Timur,

ANDREAS KEWA AMAN, SH
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 19641110 199303 1 016

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka (sebagai laporan).
2. Dekan FISIPOL Univ. Bosowa, di Makassar